



**PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM
PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 1926-1945**

SKRIPSI

Oleh

Anisatul Khoir Aprilia

NIM 120210302070

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM
PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 1926-1945**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi
Pendidikan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Anisatul Khoir Aprilia
NIM. 120210302070**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Slamet tercinta dan Ibunda Erma Hartati, terima kasih atas segala kasih sayang yang tak pernah henti, doa dikala berjuang, nasehat dikala lemah, semangat dikala putus asa, kesabaran serta pengorbanan yang tak pernah letih selama ini;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah medidik, mengajarkan, dan memberikan ilmunya kepada saya selama ini;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang banyak membantu proses pengembangan berfikir, bersikap, bertindak, serta;
4. Semua pihak yang membantu dan memberikan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.

MOTTO

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)”

(QS. Al-Maidah : 55)¹

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

(QS. Ali Imran :92)²

¹Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. Al Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT Syamiil.

²Ibid

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisatul Khoir Aprilia

NIM : 120210302070

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945” adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi yang sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Februari 2017

Yang menyatakan,

Anisatul Khoir Aprilia

NIM 120210302070

SKRIPSI

**PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PERGERAKAN NASIONAL
INDONESIA TAHUN 1926-1945**

Oleh

Anisatul Khoir Aprilia
NIM 120210302070

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sugiyanto, M. Hum.

Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Sri Handayani, M. M.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945” ini telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Jum’at, 10Februari 2017

tempat : Gedung 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris,

Drs. H. Sugiyanto, M. Hum
NIP. 19570220 198503 1 003

Dr. Hj. Sri Handayani, M. M.
NIP. 1952120 1198503 2 002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sumarjono, M. Si.
NIP. 19580823 198702 1 001

Dr. Hj. Nurul Umamah, M. Pd.
NIP. 19690204 199303 2 008

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19680802 199303 1 005

RINGKASAN

Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945;Anisatul Khoir Aprilia, 120210302070; 2017; xvi + 91 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Pada tahun 1900-an bersamaan dengan timbulnya gerakan perlawanan yang menyertai keresahan sosial di berbagai daerah timbul juga gerakan kebangkitan kembali agama yang menampakkan diri dalam bentuk sekolah-sekolah dan perkumpulan terikat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Para pemuka Islam mulai menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren dan mendirikan organisasi sosial keagamaan hingga kemudian timbul berbagai gerakan sosial keagamaan yang terorganisir secara rapi dan bermotif menegakkan ajaran Islam guna melawan penjajahan seperti Nahdlatul Ulama yang lahir di Jombang Jawa Timur tahun 1926. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang berhaluan Ahlusunnah wal Jamaah dan mengandung empat mazhab yakni Syafii, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Nahdlatul Ulama sendiri ikut berperan melawan penjajahan di Indonesia mulai dari Belanda hingga Jepang. Peran serta Nahdlatul Ulama sendiri sudah terealisasikan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan yang ada di Indonesia.

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) apa yang menjadi latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pergerakan nasional melawan penjajah di Indonesia Tahun 1926-1945?; (2) bagaimana pola perjuangan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia Tahun 1926-1945. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pergerakan nasional melawan penjajah di Indonesia Tahun 1926-1945; (2) menganalisis dan mendeskripsikan pola perjuangan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia Tahun 1926-1945. Manfaat penelitian ini adalah : (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dan memberi tambahan

pengetahuan untuk memperkaya materi sejarah, terutama mengenai sejarah nasional Indonesia; (2) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan; (3) bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan memahami mengenai peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia Tahun 1926-1945; (4) bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Politik dan teori Peran.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pergerakan nasional di Indonesia di pengaruhi oleh kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Adanya proses Kristenisasi, Eksploitasi ekonomi, penanaman budaya Barat kedalam sekolah-sekolah di Indonesia, dan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang mengakibatkan para ulama bangkit dan merasa perlu ikut campur dalam menghadapi dan mengusir penjajah dari Indonesia. Pola perjuangan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang sudah terealisasikan. Pada masa penjajahan Belanda Nahdlatul Ulama menolak usulan agar anggotanya menjabat didalam Volksraad. Pada masa pendudukan Jepang Nahdlatul Ulama lebih memilih bersikap kooperatif dengan memanfaatkan isu kolaborasi dengan pemerintahan Jepang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyampaikan saran yaitu: (1) bagi mahasiswa pendidikan sejarah hendaknya lebih banyak membaca literatur yang berkaitan dengan sejarah pergerakan bangsa Indonesia sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dimiliki; (2) bagi almamater, hendaknya menambah literatur - literatur yang berkaitan dengan sejarah pergerakan Indonesia yang dilakukan oleh organisasi Islam di Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama; (3) bagi pembaca, hendaknya memberi saran dan kritik apabila penulisan karya ilmiah tentang Peran Nahdlatu Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945 terdapat kekurangan yang nantinya bisa diperbaiki.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peran Nahdatul Ulama dalam Pergerakan Nasioanal Indonesia Tahun 1926-1945”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M. Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Drs. H. Sugiyanto, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, Dr. Hj. Sri Handayani, M.M selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesainya penulisan skripsi ini;
4. Drs. Sumarjono, M. Si selaku Dosen Penguji Utama dan Dr. Hj. Nurul Umamah, M. Pd., selaku Dosen Penguji Anggota, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan demi terselesainya skripsi ini;
5. Semua Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, yang telah memberikan bimbingan, perhatian, motivasi, semangat, dan bekal ilmu selama ini;
6. Ayahanda Slamet dan Ibunda tercinta Erma Hartati yang tak kenal lelah dalam memberi kasih sayang, perhatian, merawat, mendidik, memberikan doa, dan memberikan motivasi selama ini;
7. Adik tersayang Mohammad Rizal Baihaqi, nenek tercinta Sumaidah, paman Alm. Khoiri, bibi Sulima, kak Sofyan, mbak Nova, adik Fitroh, serta semua

keluarga besar lainnya yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini;

8. Ibu dan Bapak mertua, Tunanganku tercinta Saiful Rizal, dan adik Nasrul yang senantiasa bersamaku dalam memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Sahabat – sahabatku seperti Kamilia Ustman, Anggita Lintang CPP, Shinta Wulandari, Dila Isnı Sepran DT, Rosita Amalia, Nuril Arofah, Rinda Rustiani, dan Vivin Wulandari EP yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Serta teman-teman seperjuangan Historyca 2012, tim voli FKIP Universitas Jember, dan rekan KK-MT MAN 2 Jember yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menerima segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Jember, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Rumusan Masalah	8

1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB 3. METODE PENELITIAN	19
BAB 4. LATAR BELAKANG NAHDLATUL ULAMA BERPERAN DALAM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA	25
4.1 Nahdlatul Ulama Pada Zaman Penjajahan Belanda	26
4.1.1 Peran di Bidang Politik	27
4.1.2 Peran di Bidang Sosial	29
4.1.3 Peran di Bidang Pendidikan.....	31
4.2 Nahdlatul Ulama Pada Masa Pendudukan Jepang	34
4.2.1 Peran di Bidang Politik	35
4.2.2 Keadaan Sosial.....	36
4.2.3 Keadaan Ekonomi.....	38
4.2.4 Keadaan Pendidikan	40
BAB 5. POLA PERJUANGAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PERGERAKAN NASIONAL DI INDONESIA.....	42
5.1 Perjuangan Nahdlatul Ulama Pada Zaman Penjajahan Belanda	42
5.2 Perjuangan Nahdlatul Ulama Pada Masa Pendudukan Jepang	62

5.2.1 Nahdlatul Ulama Tergabung dalam Organisasi Bentukan Jepang	68
5.2.2 Peran Serta Nahdlatul Ulama dalam Proses Perumusan Ideologi Negara dan Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.....	78
BAB 6. PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran A	Matriks Penelitian	90
Lampiran B	Foto Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama	92
	B.1: KH. Hasyim Asy'ari	92
	B.2: KH. A. Wahid Hasyim	93
	B.3: KH. Ridwan Abdullah	94
	B.4: KH. A. Wahab Hasbullah	95
	B.5: KH. Masykur	96
	B.6: KH. Mas Alwi Abdul Aziz	97
	B.7: KH. Zainul Arifin	98
	B.8: KH. Abdul Hamid	99
Lampiran C	Surat Delegasi NU Kepada Raja Saudi Arabia	100
Lampiran D	Surat Balasan Raja Saudi Arabia Untuk NU	105
Lampiran E	Anggaran Dasar NU Tahun 1926	107
Lampiran F	Maklumat NU Untuk Kongres Rakyat Indonesia	113
Lampiran H	Gambaran Museum NU	114

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

A

Ahlussunnah wal jamaah adalah ajaran Islam murni yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya yang bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para ulama' sebelumnya) serta Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita al-Qur'an dan Hadits).

B

Bansai adalah hidup.

Bloedtransfosie adalah pajak.

C

Chuo Sangi In adalah pada zaman sekarang setara dengan dewan pertimbangan rakyat (DPR).

D

Delegasi adalah seseorang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan (negara) dalam suatu perundingan (musyawarah).

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai adalah sebuah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 1944 dan diketuai oleh Radjiman Widyodiningrat.

E

Eksplotasi adalah usaha untuk memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri.

F

Fasisme adalah prinsip atau paham nasionalis ekstrem yang menganjurkan pemerintahan otoriter (berkuasa sendiri atau sewenang – wenang).

G

GAPI adalah Gabungan Politik Indonesia.

Gunseikan adalah Kepala pemerintahan militer.

Guru Ordonantie adalah peraturan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sistem pengajaran pesantren atau madrasah.

H

Heiho (Pembantu Tentara Jepang) adalah suatu organisasi miter yang dibentuk oleh pemerintah miter Jepang.

Hindia Belanda adalah istilah dari pemerintah kolonial Belanda untuk menyebut wilayah Indonesia.

Hizbullah adalah sebuah laskar pemuda dibawah pimpinan Masyumi.

I

Ideologi adalah suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan.

Imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara dengan menguasai negara lain.

J

Jawa Hokokai adalah Kebaktian Rakyat Jawa.

K

Kaigun adalah Angkatan Laut Jepang.

Kimigayo adalah lagu kebangsaan Jepang.

Kolonial adalah berhubungan atau berkenaan dengan sifat – sifat jajahan.

Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara.

Kooperatif adalah bersifat kerjasama.

Kristening Politiek adalah kebijakan menasranikan bangsa Indonesia pada zaman Belanda.

L

Landraad adalah pengadilan tingkat pertama untuk orang pribumi yang perdatanya adalah hukum adat.

M

Mazhab adalah aliran, pendapat, atau paham.

Masyumi adalah majelis syuro muslimin Indonesia terbentuk pada bulan Oktober 1943 sebagai badan federasi organisasi Islam pada masa pendudukan Jepang.

MIAI adalah Majelis Islam A'la Indonesia.

Milisi adalah wajib militer pada masa penjajahan Belanda.

Mukaddimah adalah pembukaan.

N

Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau kesadaran keanggotaan disuatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama – sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu.

O

Ordonansi adalah peraturan pemerintah.

P

Penjajahan adalah suatu proses atau perbuatan menguasai atau memerintah suatu negara (daerah).

PETA (Pembela Tanah Air) adalah suatu organisasi miter yang dibentuk oeh pemerintah militer Jepang.

Putera (Pusat Tenaga Rakyat) adalah suatu organisasi bentukan Jepang yang dipimpin oleh tokoh – tokoh yang dikenal rakyat dengan sebutan “Empat Serangkai” yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Mas Mansyur.

R

Romusha adalah tenaga kerja kasar pada masa pendudukan Jepang.

S

Saiko Shikikan adalah Panglima tertinggi.

Sabilillah adalah tentara kaum muslimin yang dibentuk oleh pemerintah Jepang atas prakarsa kyai dan ulama.

Saikeirei adalah kegiatan membungkukkan badan untuk menghormati kekaisaran Jepang.

Shumubu adalah kantor urusan agama pada masa pendudukan Jepang

Shumubu-cho adalah Kantor Urusan Agama Pusat yang ada di Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

Shumuka adalah Kantor Urusan Agama Daerah yang ada di Indonesia pada pendudukan Jepang.

Sumera adalah penanggalan Jepang.

W

Waliyyul amri dharuri bissyaukah adalah pemegang kekuasaan temporer atas pemerintahan.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bersamaan dengan timbulnya gerakan perlawanan yang menyertai keresahan sosial di berbagai daerah pada tahun 1900-an timbul juga gerakan kebangkitan kembali agama yang menampakkan diri dalam bentuk sekolah-sekolah dan perkumpulan terekat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Para tokoh agama Islam mulai menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren atau mendirikan organisasi-organisasi sosial keagamaan hingga kemudian timbul berbagai gerakan sosial dan keagamaan yang terorganisir secara rapi dan bermotif menegakkan ajaran Islam guna melawan penjajah kolonial Belanda. Gerakan – gerakan itu adalah Muhammadiyah (di Yogyakarta, 1912), Syarikat Islam (di Sala, 1905), Al-Irsyadiyah (di Jakarta, 1914), Nahdlatul Ulama (di Surabaya, 1926), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Perti (di Bukit Tinggi, 1928), dan lain-lain (Anam, 1985: 18-23). Nahdlatul Ulama adalah gerakan dari para ulama-ulama Islam di Indonesia yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari dari Jombang Jawa Timur. Melalui lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren, Nahdlatul Ulama berhasil menanamkan semangat dan watak anti kolonialisme dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan Ahlussunnah wal *jama'ah* yang beraliran empat mazhab yakni Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nahdlatul Ulama juga berhasil menggalang persatuan dan kesatuan serta semangat nasionalisme seluruh umat Islam di Indonesia.

Kelahiran Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 salah satunya didorong oleh faktor sosial yang berkaitan dengan religi dan berdirinya Nahdlatul Ulama ini juga tak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal *jama'ah* (aswaja) yakni ajaran islam murni yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya yang bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para

ulama sebelumnya) serta Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita al-Qur'an dan Hadits).

Dorongan ini merupakan reaksi terhadap gerakan pembaharuan yang berhembus dari Timur Tengah yang hanya menekankan al-Qur'an dan Hadits saja untuk memberlakukan dan menilai Islam. Para ulama bangkit membela peri kehidupan keagamaan yang berlandaskan tradisi (sunnah) dan mazhab (aliran) serta mempertahankannya dari serangan kaum Wahabi. Jadi lahirnya Nahdlatul Ulama ini adalah karena dorongan untuk mempertahankan kebebasan menganut salah satu dari empat mazhab yakni Imam Muhammad bin idris Asy-Syafi'I, Imam Malik bin Anas, Imam Abuhanifah An Nu'man, dan Imam Ahmad bin Hambali yang keempat mazhab tersebut lebih dikenal sebagai mazhab *Ahlussunnah wal jama'ah* (Anam, 1985: 33).

Haluan ideologi *Ahlussunnah wal jama'ah* ini lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain (1) Kekuatan penjajah untuk meruntuhkan potensi Islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran Islam, (2) Rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan diri dari belenggu penjajah, dan (3) Rasa tanggung jawab alim ulama untuk menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia. Pengaruh Nahdlatul Ulama yang besar di kalangan Kyai dan Ulama di Jawa Timur, Jawa Tengah serta kaum awam sebagaimana dirumuskan dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pada tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu dari 4 mazhab dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain motif agama dan motif mempertahankan ajaran *Ahlussunnah wal jama'ah* (aswaja), Nahdlatul Ulama juga lahir karena faktor politik yakni dorongan untuk merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Nahdlatul Ulama berusaha membangun nasionalisme melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan. Nahdlatul Ulama yang awalnya berdirinya bergerak dalam bidang sosial agama tidak mungkin melepaskan diri dalam persoalan dan kondisi bangsa Indonesia yang mengalami tekanan dari bangsa penjajah. Lahirnya Nahdlatul Ulama juga untuk memberdayakan

masyarakat serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, maka Nahdlatul Ulama memasuki ranah politik demi memperjuangkan kebebasan rakyat Indonesia. Kemunculan Nahdlatul Ulama secara langsung atau tidak berkaitan erat dengan politik penjajahan Belanda terhadap agama Islam. Pada awalnya Belanda tidak merasa perlu bertrok langsung dengan orang Islam, tetapi munculnya pemberontakan yang diperkuat motif keagamaan mendorong Belanda berupaya membendung gerakan-gerakan Islam yang ada di Indonesia.

Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa pemerintah kolonial bukan pemerintahan Islam dan tidak memiliki kecocokan dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa Islam tidak membenarkan penjajahan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain. Apa yang dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia yang sangat bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, kelahiran Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari telah mempengaruhi pendapat umum bahwa sikap anti Belanda bukan hanya dilakukan oleh kaum komunis. Pada saat itu Nahdlatul Ulama tidak mengekspresikan sikap anti penjajah secara radikal dan terang-terangan. Gerakan sikap anti penjajah Nahdlatul Ulama dilakukan secara diam-diam dan ditumbuhkembangkan melalui pondok pesantren. Bersama gerakan Islam seperti MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) tahun 1937 dan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1939, Nahdlatul Ulama menghendaki dibentuknya parlemen dengan tujuan agar Pemerintah Hindia Belanda terkontrol. Di samping itu Nahdlatul Ulama juga menolak kewajiban Milisi (menjadi tentara Hindia Belanda) yang diterapkan untuk pemuda Indonesia (Sutarto, 2005:45-46).

Pada masa pendudukan Jepang aktivitas Nahdlatul Ulama terpusat pada perjuangan membela tanah air baik secara fisik maupun politik. Pada awalnya Nahdlatul Ulama bersikap kooperatif terhadap pemerintah Jepang dalam rangka mengusir penjajah Belanda. Sikap Nahdlatul Ulama terhadap Jepang tidak sekeras ketika menghadapi kolonial Belanda. Apabila pada masa penjajahan Belanda

Nahdlatul Ulama menolak duduk dalam Volskraad, namun pada masa pendudukan Jepang Nahdlatul Ulama memilih bersikap lunak dan diplomatis dengan memanfaatkan isu kolaborasi dengan Jepang dalam bentuk apapun. Para tokoh Nahdlatul Ulama aktif bergabung dengan organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan Tiga A, Poetra, dan Jawa Hokokai. Ketika pemerintah Jepang membentuk Kantor Urusan Agama (Shumubu) pada tahun 1944 yang dipercayakan kepada KH. Hasyim Asy'ari untuk menjadi ketua dalam kantor tersebut. Nahdlatul Ulama pada masa pendudukan Jepang ini melihat bahwa Jepang memperlakut umat Islam demi tujuan politik atau kekuasaan pemerintahannya. Oleh sebab itu Nahdlatul Ulama berubah menjadi konfrontatif terhadap Jepang. Hal tersebut berarti membuat Nahdlatul Ulama sudah tidak lagi mengkhhususkan diri pada persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan saja, melainkan juga melibatkan diri pada urusan politik (Ridwan, 2010: 56-59).

Tokoh Nahdlatul Ulama yaitu KH. A. Wahid Hasyim mengadakan kontak dengan para tokoh nasionalis untuk mendesak pemerintah militer Jepang segera mewujudkan janji kemerdekaan untuk Indonesia maka terbentuklah lascar Hizbullah dan Sabilillah atas persetujuan pemerintah Jepang. Baik Hizbullah maupun Sabilillah ditingkatkan perannya sebagai tentara professional dan juga disusun Anggaran Dasar barisan Hizbullah dan Sabilillah. Tujuan dibentuknya tentara sabil tersebut yakni untuk menegakkan agama Islam dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang. Selanjutnya KH. A. Wahid Hasyim juga ikut merumuskan dasar negara dan ikut menandatangani Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Tahun 1945 Nahdlatul Ulama juga ikut merumuskan Pancasila dan UUD 1945 melalui kehadiran KH. A. Wahid Hasyim, KH. Masjkur, Zainal Arifin dan menerima adanya negara berideologi Pancasila dengan kategori negara damai, bukan negara Islam dan tidak menentang Islam. Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan Resolusi Jihad pada bulan Oktober 1945 yang mewajibkan umat Islam memperjuangkan kemerdekaan dan tanah air sebagai jihad fi sabilillah, serta

penempatan Presiden RI sebagai waliyyul amri dharuri bissyaukah (pemegang kekuasaan temporer atas pemerintahan) (Aboebakar, 1959:179).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka terdapat perbedaan antara realita empiris dan realita teoritisnya. Realita empiris bahwa dari fakta-fakta yang ada Nahdlatul Ulama telah menunjukkan sikap politik praktisnya dalam menilai maupun menghadapi penjajahan di Indonesia. Buktinya terlihat ketika pada masa penjajahan Belanda yakni Nahdlatul Ulama berusaha membangun semangat nasionalisme melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan, Nahdlatul Ulama juga menunjukkan sikap anti penjajah secara diam-diam dan ditumbuhkembangkan melalui dunia pesantren, bersama organisasi Islam MIAI dan GAPI Nahdlatul Ulama juga menghendaki dibentuknya parlemen dengan maksud agar tindakan Pemerintah Hindia Belanda dapat terkontrol, dan Nahdlatul Ulama juga menolak kewajiban Milisi yakni menjadi tentara Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang Nahdlatul Ulama juga menunjukkan sikap kooperatif terhadap Jepang yakni memanfaatkan isu kolaborasi dan mengerahkan anggota-anggotanya untuk memasuki organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan Tiga A, Poetra, dan Jawa Hokokai. Hal lainnya juga terlihat ketika pembentukan ideologi negara, bahwa Nahdlatul Ulama ikut tergabung dalam BPUPKI dan Panitia Sembilan untuk merumuskan ideologi negara. Sedangkan realita teoritisnya masih sedikit penelitian yang mengkaji tentang peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia dari tahun 1926-1945 khususnya ketika jaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Adanya perbedaan antara realita empiris dan realita teoritis tersebut membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia. Selain itu pula penulis juga ingin menggambarkan bagaimana Nahdlatul Ulama berperan dan ikut tergabung dalam BPUPKI dan panitia Sembilan yang akhirnya merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara. Semua kajian tersebut penulis kemas dalam penelitian ilmiah yang berjudul "*Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945*".

1.2 Penegasan Judul

Guna menghindari perbedaan persepsi antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian terkait dengan judul “Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945”.

Pengertian peran menurut Soekanto menjelaskan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Anam (1985:16) dalam buku yang berjudul “ Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama” menjelaskan bahwa yang dimaksud Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para ulama pesantren yang memegang teguh salah satu empat mazhab yang berhaluan Ahlussunnah wal jama 'ah yang bertujuan tidak saja memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal jama 'ah tetapi memperhatikan masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi dalam rangka pengabdian kepada bangsa, negara, dan seluruh ummat manusia.

Pengertian Pergerakan Nasional menurut Pringgodigdo (1994) dapat diartikan sebagai gerakan perjuangan nasional yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mencapai kemerdekaan bangsa. Pergerakan nasional Indonesia mulai tumbuh dan mengalami perkembangan yang berarti ketika secara resmi Budi Utomo diakui pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1908. Menurut Pringgodigdo tahapan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia meliputi, tahap awal pergerakan (1908-1920), tahap nasionalisme radikal (1920-1930), dan tahap nasionalisme moderat (1930-1942). Tahapan – tahapan perkembangan nasionalisme tersebut memberi arti yang jelas tentang cita – cita setiap organisasi pergerakan yang mampu menggalang semangat persatuan dan menumbuhkan cita – cita kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Tahun 1926-1945” adalah peran Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi sosial keagamaan dalam pergerakan nasional untuk melawan penjajah Belanda dan Jepang demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penelitian sangat penting ditentukan dengan maksud untuk membatasi dan mengerucutkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pembatasan ruang lingkup akan menjadi sangat penting agar bisa terfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini adalah tahun 1926-1945. Tahun 1926 dijadikan sebagai batas awal penelitian ini karena tahun 1926 merupakan tahun kelahiran organisasi Islam Nahdlatul Ulama di Indonesia. Sedangkan tahun 1945 dijadikan batas akhir penelitian karena pada tahun 1945 terjadi suatu peristiwa penting dan bersejarah yakni tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan peranan Nahdlatul Ulama telah terealisasikan di dalam kemerdekaan tersebut.

Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian ini adalah negara Indonesia, melalui kajian pustaka. Hal ini di maksudkan karena Indonesia merupakan negara yang mencapai kemerdekaannya melalui perjuangan dan pergerakan nasional. Di Indonesia juga terdapat berbagai macam organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama yang lahir di Jombang (Jawa Timur) pada tahun 1926 yang ikut berperan dalam pergerakan nasional tersebut.

Konteks yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai latar belakang Nahdlatul Ulama berperan dalam pergerakan nasional melawan penjajah Belanda dan Jepang, serta perjuangan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia guna mewujudkan kemerdekaan republik Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan seperti dibawah ini;

- 1) apa yang menjadi latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pergerakan nasional melawan penjajah di Indonesia tahun 1926-1945?
- 2) bagaimana pola perjuangan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia tahun 1926-1945?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) mendeskripsikan latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pergerakan nasional melawan penjajah di Indonesia tahun 1926-1945;
- 2) menganalisis dan mendeskripsikan pola perjuangan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia tahun 1926-1945.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain;

- 1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dan memberi tambahan pengetahuan untuk memperkaya materi sejarah, terutama mengenai SNI (Sejarah Nasional Indonesia);
- 2) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan;
- 3) bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan memahami mengenai peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia tahun 1926-1945;
- 4) bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan tentang berbagai pendapat para ahli dan sumber primer berupa Buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai “Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945”, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku maupun yang tidak diterbitkan, misalnya berupa, skripsi, tesis, jurnal, maupun laporan penelitian.

Anam (1985) dalam bukunya yang berjudul “ *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* “ Menjelaskan bahwa bersamaan dengan timbulnya gerakan perlawanan yang menyertai keresahan sosial di berbagai daerah pada tahun 1900-an timbul juga gerakan kebangkitan kembali agama yang menampakkan diri dalam bentuk sekolah-sekolah dan perkumpulan tarekat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Para pemuka Islam mulai menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren atau mendirikan organisasi-organisasi sosial keagamaan hingga kemudian timbul berbagai gerakan sosial dan keagamaan yang terorganisir seperti Serekat Islam tahun 1905, Muhammadiyah tahun 1912, Al Irsyadidah tahun 1914, Nahdlatul Ulama tahun 1926, dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (1985: 18-23).

Sholeh (1995) dalam bukunya yang berjudul “ Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan” pada bab pertama juga menjelaskan bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda telah menimbulkan kemarahan dan kebencian penduduk Indonesia terhadap Belanda. Hal ini berarti tampak jelas bahwa ada reaksi yang tajam dari rakyat Indonesia untuk menentang penjajahan seperti yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya pemuka agama. Para pemuka Islam mulai menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren dengan mendirikan organisasi sosial keagamaan yang terorganisir yaitu Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tahun 1926.

Dekker (1975) dalam bukunya yang berjudul “ Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia ” mengemukakan bahwa pada tahun 1926, didirikanlah organisasi

Nahdlatul Ulama yaitu suatu organisasi sosial yang menekankan kegiatannya dalam lapangan perluasan pendidikan berdasarkan Islam. Pusatnya adalah Jombang Jawa Timur dengan tokoh utamanya adalah KH. Hasyim Asy'ari. Disamping kegiatannya dalam lapangan sosial, seperti mendirikan masdrasah-madrasah, kemudian ikut juga terjun dalam dunia politik. Pada waktu itu Nahdlatul Ulama ikut menyokongnya dengan ikut sertanya KH. A. Wahid Hasyim tokoh Nahdlatul Ulama di dalamnya. Keterlibatannya terlihat pada masa penjajahan Belanda yang partisipasi politik Nahdlatul Ulamanya diarahkan untuk menentang kekuasaan kolonial Belanda sekaligus untuk menggalang kekuatan ummat Islam dalam menghadapi kolonialisme tersebut (1975 : 102).

Prawiranegara (1986) dalam bukunya yang berjudul “ Islam dan Perkembangan Politik di Indonesia ” juga mengemukakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah gerakan dari para ulama-ulama Islam di Indonesia yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari dari Jombang Jawa Timur. Melalui lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren, Nahdlatul Ulama berhasil menanamkan semangat dan watak anti kolonialisme dengan berpegang teguh pada ajaran Islam dan Ahlussunnah wal *jama'ah*. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama berhasil menggalang persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam Indonesia untuk melawan Penjajahan kolonial Belanda.

Ditegaskan pula oleh Khuluq (2000) dalam bukunya yang berjudul “ *Fajar Kebangkitan Ulama (Biografi KH. Hasyim Asy'ari)* “ bahwa selain faktor sosial agama, Nahdlatul Ulama juga lahir karena dorongan untuk mempertahankan paham Ahlussunnah wal *jama'ah* yang sesuai dengan Al-Qur'an, sunah Rasul, dan fiqih yang mengikuti empat mazhab yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, serta Hambali.

Sutarto (2005) dalam bukunya yang berjudul “ Menjadi NU Menjadi *Indonesia* ” juga mengemukakan bahwa proses kelahiran Nahdlatul Ulama sangat berbeda dari proses kelahiran suatu organisasi yang lainnya, karena Nahdlatul Ulama dilahirkan atas inisiatif para ulama yang telah memiliki cita-cita dan paham yang sama, yakni pengikut ajaran *Ahlussunnah wal jama'ah* yang berhaluan mazhab Syafi'i. Pada hakikatnya, *Alussunnah wal jama'ah* adalah ajaran Islam murni

sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya.

Pringgodigdo (1949: 108-109) dalam bukunya yang berjudul “ Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia ” menguraikan bahwa perkumpulan Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai (a) reaksi terhadap kebangsaan dan hasil baik dari golongan modernis dan teristimewa dan (b) karena kaum ulama orthodox takut, bahwa niat S.I. (Serekat Islam) dan Muhammadiyah tentang Kongres Dunia Kaum Islam yang ada di bawah pengaruh Raja Ibn Saud, akan mendatangkan pengaruh Wahabi di Indonesia. Dalam bulan September tahun 1926 Nahdlatul Ulama pun mengadakan kongres di Surabaya sebagai aksi menentang kongres P.S.I – M.A.I.H.S. (Muktamar al-Alam al-Islam Far’al Hind as-Sjarqyah) bersama.

Anam (1985) juga menjelaskan bahwa Selain motif agama dan motif mempertahankan *Ahlussunnah wal jama’ah*, Nahdlatul Ulama lahir karena dorongan untuk kemerdekaan Indonesia. Nahdlatul Ulama berusaha membangun semangat nasionalisme melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan. Nahdlatul Ulama yang awalnya berdiri bergerak dalam bidang sosial agama juga bergerak dalam bidang politik karena tidak mungkin Nahdlatul Ulama melepaskan diri dalam persoalan dan kondisi bangsa yang mengalami tekanan dari bangsa penjajah. Karena lahirnya Nahdlatul Ulama untuk memberdayakan dan membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, maka Nahdlatul Ulama memasuki ranah politik demi memperjuangkan kebebasan masyarakat.

Kemunculan Nahdlatul Ulama secara langsung atau tidak berkait erat dengan politik penjajahan Belanda terhadap Islam. Pada awalnya Belanda tidak merasa perlu bentrok langsung dengan Islam, tetapi munculnya perlawanan yang diperkuat motif keagamaan mendorong Belanda berupaya membendung gerakan-gerakan Islam. Pandangan ulama Nahdlatul Ulama juga menganggap bahwa persoalan-persoalan politik dan kenegaraan adalah bagian dari syariat Islam yang harus diwujudkan demi terciptanya kehidupan yang aman, bebas, dan sejahtera.

Adanya pandangan keagamaan tersebut menjadikan Nahdlatul Ulama harus mengambil bagian langsung maupun tidak langsung dalam proses politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa penjajahan Belanda partisipasi politik Nahdlatul Ulama diarahkan untuk menentang dan melawan kekuasaan kolonial sekaligus untuk menyatukan kekuatan umat Islam dalam menghadapi penjajahan tersebut. Pandangan politik Nahdlatul Ulama sangat menekankan terhadap pentingnya persatuan kekuatan Islam terutama dalam melawan penjajah (1985: 3).

Sejak pendudukan Jepang menggantikan penjajahan Belanda pada tahun 1942, maka semua organisasi yang didirikan oleh masyarakat dilarang bergerak. Organisasi yang boleh bergerak hanya organisasi yang dibentuk oleh Jepang atau sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. Nahdlatul Ulama termasuk organisasi yang dilarang bergerak oleh pemerintah Jepang. Pada masa awal pendudukan Jepang ini, Nahdlatul Ulama mula-mula bersikap kooperatif terhadap pemerintah Jepang dalam rangka mengusir kolonial Belanda. Ketika pemerintah Jepang membentuk kantor urusan Agama (Shumubu) pada tahun 1944 yang pada awalnya dipimpin oleh orang Jepang dan digantikan oleh KH. Hasyim Asy'ari sejak 1944 sampai Agustus 1945 yang merupakan konsesi Jepang terhadap kaum muslimin. Ketika Nahdlatul Ulama melihat bahwa Jepang hanya memperlakukan umat Islam untuk tujuan-tujuan politik, maka Nahdlatul Ulama berubah menjadi konfrontatif terhadap Jepang.

Hal ini ditegaskan pula oleh Budiyono dalam laporannya (1998) yang berjudul "Pola Pengendalian Pemerintah Jepang Terhadap Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1942-1945" bahwa pemerintah Jepang dalam melaksanakan propagandanya melakukan pendekatan terhadap ulama guna mendapatkan simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Perhatian pemerintah Jepang terhadap ulama memang cukup beralasan, sebab penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Menurut persepsi orang Jepang dengan merangkul tokoh-tokoh ulama, maka dianggap mudah untuk bekerja sama dan mudah untuk menggerakkan bangsa Indonesia dalam rangka membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Kerjasama tersebut ternyata direalisasikan dengan memberikan kesempatan pada

tokoh ulama KH. Hasyim Asy'ari untuk menduduki jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan yaitu sebagai pimpinan Kantor Urusan Agama (Shumubu).

Ridwan (2010) menjelaskan bahwa Pada bulan April 1945 pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang dengan tujuan merealisasikan janji pemerintah Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyusun rencana-rencana pembangunan politik atau pemerintahan Indonesia merdeka. Selanjutnya tugas BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang beranggotakan sembilan orang yaitu Soekarno, Moh. Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, A. Subarjo, Muhammad Yamin, termasuk juga KH. A. Wahid Hasyim tokoh dari NU untuk merumuskan Piagam Jakarta yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 yang didalamnya terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila. Isinya adalah sebagai berikut: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat penyusunan UUD pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan sebagai Mukaddimah (2010: 60-74).

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, para tokoh BPUPKI perlu mengadakan pemantapan ideologi negara berkaitan dengan adanya pihak yang keberatan dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang dianggap diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Pertemuan itu menghasilkan rumusan Pancasila baru yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip pertama Piagam Jakarta dirumuskan secara singkat menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas usul seorang penganut Hindu-Bali, I Gusti Ketut Pudja istilah Allah diganti dengan Tuhan. Kata Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tauhid (keesaan Allah) dalam ajaran agama Islam. Nahdlatul Ulama menerima asas Pancasila berdasarkan keyakinan bahwa Islam

adalah agama fitrah yang mengakui adanya nilai-nilai yang baik dalam masyarakat dan dapat disempurnakan melalui pendalaman agama.

Penelitian lain yang sejenis milik Murfianti (2012) yang berjudul “peran Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia tahun 1936-1945” mengatakan bahwa peran organisasi Nahdlatul Ulama dalam melawan penjajah diawali dari Mukktamar Nahdlatul Ulama ke XI di Banjarmasin pada tahun 1936 yang menghasilkan kesepakatan untuk menjawab masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Kemudian pada Mukktamar Nahdlatul Ulama di Menes Banten mengajukan usul agar anggota Nahdlatul Ulama memasuki ranah politik namun ditolak. Sikap non kooperatif Nahdlatul Ulama ditunjukkan dengan penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan Belanda yang mewajibkan milisi serta penentangan yang ditunjukkan dengan adanya ordonansi guru, ordonansi haji, dan masalah pemindahan hak waris serta urusan perkawinan. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian diatas lebih memfokuskan peran Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda mengenai usaha Nahdlatul Ulama dalam mencapai kemerdekaan dan mengkritisi kebijakan kolonial Belanda yang memberatkan bangsa Indonesia.

Penelitian Sejenis selanjutnya milik Mahmudi (2014) yang berjudul “Peran Nahdlatul Ulama dalam Pembentukan Ideologi Negara Republik Indonesia” mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan ideologi negara Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan sampai dengan masa Konstituante Nahdlatul Ulama vocal untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Akan tetapi setelah melalui perjuangan dan usaha maksimal Nahlatul Ulama harus rela untuk menerima kenyataan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan paksaan dan berimbas adanya perpecahan. Setidaknya kewajiban untuk mengekkan Syariat Islam sudah dilaksanakan masalah hasilnya sudah menjadi bahasan lain, yan terpenting tujuan Islam yaitu *rahmatan lil ‘alamin* (kesejahteraan bagi semesta) dapat terealisasikan, dengan maksud yaitu penyatuan visi Islam tentang kehidupan ke dalam tujuan utama pendirian negara – negara. Nahdlatul ulama

menempatkan negara sebagai alat bagi pencapaian tujuan Islam. Maka, karena tujuan Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* (kesejahteraan bagi semesta), negara yang mengarah ke tujuan tersebut bisa diterima, meski akhirnya tidak berbentuk Islam / negara Islam melainkan berbentuk Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai macam agama, ras, suku, bahasa, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa penelitian itu lebih memfokuskan pada peranan Nahdlatul Ulama dalam perumusan ideologi negara Republik Indonesia yang di dalamnya banyak dibahas mengenai tokoh – tokoh Nahdlatul Ulama seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahid Hasyim yang terlibat langsung dalam perumusan ideologi negara Republik Indonesia serta usaha – usaha yang telah di lakukan oleh beliau demi terbentuknya ideologi negara di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari berbagai pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu masih membahas organisasi Nahdlatul Ulama secara umum saja bahkan belum ada yang memfokuskan pada peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional khususnya di Indonesia dalam meraih kemerdekaan tahun 1926-1945. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional guna mewujudkan Indonesia merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Beberapa sumber telah penulis dapatkan sehingga diharapkan penulisan karya ilmiah ini dapat menambah referensi bacaan tentang peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945.

Dari beberapa teori di atas, maka penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan sosiologi politik mempelajari tentang fenomena kekuasaan di dalam setiap pengelompokan manusia, bukan hanya di dalam negara masing-masing kelompok manusia terwujud dalam suatu struktur yaitu suatu kerangka di mana aspek-aspek konflik dan integrasi dari kekuasaan saling memainkan peran (Duverger: 1998 : 27). Pendekatan sosiologi politik ini digunakan

untuk menganalisis pola umum penguasaan bangsa asing yaitu Belanda dan Jepang terhadap sistem ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan di Indonesia.

Guna mempertajam hasil analisis dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang akan diteliti. Teori peran merupakan proses dinamis terhadap suatu kedudukan dari perilaku seseorang yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu atau perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu (Bruce, 1992:76). Penelitian tentang peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia di rasa cocok apabila menggunakan teori peran tersebut. Pada teori peran ini, ada tiga langkah yang perlu diperhatikan.

- a. Peran adalah meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Konsep peran sangat penting untuk memahami perilaku yang diharapkan dan diberikan kepada suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi. Kedudukan yang dipegang seseorang dalam suatu organisasi ini yaitu Nahdlatul Ulama mencakup posisi yang penting, ini berarti jumlah tanggung jawab dan peranan organisasi tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dari tiga langkah yang disebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada langkah pertama ini Nahdlatul Ulama dengan banyak pejuang di dalamnya seperti KH. Hasyim Asy'ary, KH. A. Wahid Hasyim, KH. Wahab Hasbullah, dan yang lainnya merupakan salah satu organisasi yang mempunyai tempat yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. Karena lahinya Nahdlatul Ulama untuk

memberdayakan masyarakat serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi, oleh sebab itu Nahdlatul Ulama memasuki ranah politik demi memperjuangkan kebebasan rakyat Indonesia dari penjajah (Anam, 1985: 33).

Kedua, dalam teori peran mencakup suatu konsep tentang tindakan yang dapat dilakukan seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi. Pada langkah ini lebih melihat terhadap perihal apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia sebagai organisasi sosial keagamaan. Kedudukan Nahdlatul Ulama dan para pemuka Islam dimanfaatkan sebagai salah satu organisasi yang dapat menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren yang akhirnya juga berkiprah dalam ranah politik demi membebaskan rakyat Indonesia dari penjajah. Terbentuknya Nahdlatul Ulama karena faktor politik adalah dorongan untuk merdeka. Nahdlatul Ulama berusaha membangun semangat nasionalisme melalui kegiatan keagamaan dan pendidikan. Selain ranah politik, NU juga masuk dan berperan dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan (Anam, 1985:33).

Ketiga, perilaku seseorang yang mempunyai kedudukan penting bagi struktur sosial di masyarakat. Pada langkah ini lebih melihat dampak terhadap tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mempunyai manfaat bagi masyarakat. Peran politik Nahdlatul Ulama dalam proses kehidupan bangsa Indonesia dapat dilihat sejak berdirinya tahun 1926 hingga sekarang melalui kebijakan-kebijakan resmi organisasi maupun aktivitas-aktivitas dalam setiap peristiwa politik, oleh karena itu Nahdlatul Ulama selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda partisipasi politik Nahdlatul Ulama diarahkan untuk menentang kekuasaan kolonial Belanda sekaligus untuk menggalang kekuatan ummat Islam dalam menghadapi kolonialisme. Pada masa pendudukan Jepang Nahdlatul Ulama menunjukkan sikap kooperatif dengan memanfaatkan isu kolaborasi dan mengerahkan anggotanya untuk memasuki organisasi-organisasi bentukan Jepang. Hal itu semua dilakukan agar Indonesia segera mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajah. Pandangan politik Nahdlatul Ulama sangat menekankan pada pentingnya persatuan ummat Islam terutama dalam menghadapi penjajah. Karena

adanya motivasi yang kuat untuk mempersatukan kekuatan ummat Islam maka dibentuklah badan federasi organisasi-organisasi Islam bernama Al Majlisul Islamil *A'laa Indonesia* (MIAI) pada tanggal 18-21 September 1937 di Pondok Kebondalem Surabaya. Melalui badan MIAI inilah Nahdlatul Ulama melakukan aktivitas politiknya terutama untuk mengajukan tuntutan kemerdekaan terhadap pemerintah Belanda maupun Jepang (Ridwan, 2010: 56-59).



BAB 3. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dikarenakan data-data yang dipergunakan adalah sejarah mengenai peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottschalk, 1985:32). Metode penelitian sejarah adalah prosedur dari sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang termuat dalam sumber sejarah (Notosusanto, 1971:17). Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur utama yang digunakan oleh sejarawan dalam melakukan rekonstruksi peristiwa masa lampau secara kritis berdasarkan pada jejak-jejak yang telah ditinggalkan. Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data dari berbagai literatur, sehingga sering disebut studi literatur. Metode sejarah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.

Langkah Pertama dalam melakukan penelitian ini adalah heuristik. Dalam langkah heuristik penulis melakukan kegiatan untuk mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Oleh karena kajian ini berupa kajian pustaka, maka penulis harus mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik berupa artikel, buku, laporan penelitian maupun buletin yang terkait dengan peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber sejarah yang diperoleh dari beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Pusat Universitas Jember, buku referensi Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember, buku referensi dari Museum Nahdlatul Ulama di Surabaya, Toko-toko buku, dan koleksi pribadi penulis. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa, buku, dokumen, dan

penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang digunakan oleh peneliti antara lain, karya : Choirul Anam terbit tahun 1985 yang berjudul “ Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama”, Aboebakar terbit tahun 1957 yang berjudul “ Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim”, Haryy Jundrich Benda terbit tahun 1958 yang berjudul “ *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*”, KH. Abdul Halim terbit tanpa tahun yang berjudul “ *Sejarah Perjuangan KH. A. Wahab Hasbullah*” dan Akarhanaf terbit tahun 1950 yang berjudul “ *Kyai Hasyim Asy’ari Bapak Ummat Islam Indonesia*”. Buku Sedjarah Hidup KH. Wahid Hasjim ini ditulis oleh sejarawan bernama H. Aboebakar Atjeh, buku sejarah hidup KH. A. Wahid Hasyim yang sangat lengkap ini juga disertai pengantar oleh Menteri Agama Muhammad Ilyas (1958) dan juga pengantar dari KH. Idaham Chalid Wakil Perdana Menteri RI II (1958). Buku ini berisi 1047 halaman dan dalam pengantarnya, H. Aboebakar Atjeh mengatakan bahwa inisiatif penulisan buku ini muncul pada saat penyerahan gambar KH. A. Wahid Hasyim dari kementrian agama kepada keluarga almarhum pada tahun 1954. Kemudian menteri Agama dengan keputusannya No. 4 tahun 1954 menugaskan H. Abubakar Atjeh untuk menulis biografi KH. A. Wahid HASyim yang tiada lain adalah cucu Hadratusyeikh KH. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama. Buku ini dimulai dengan Bag I yaitu Islam dan Pesantren dan Bab IV kumplan tulisan KH. A. Wahid Hasyim. Buku selanjutnya yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Choirul Anam, buku ini menekankan kepada faktor-faktor yang mendorong lahirnya Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy’ari, masa perkembangan Nahdlatul Ulama pada zaman Belanda dan Jepang, bagaimana Nahdlatul berkiprah dalam bidang politik di Indonesia sampai masa orde baru hingga akhirnya kembali ke khittah 1926. Buku ini merupakan buku babon dari buku Nahdlatul Ulama lainnya. Alasan penulis menjadikan 5 buku tersebut sebagai sumber primer dikarenakan memiliki keobjektifan dalam menguraikan fakta-fakta tentang peran Nahdatul Ulama di Indonesia khususnya pada bidang politik, fakta-fakta tersebut juga didukung dengan

sumber lainnya yang memiliki kesamaan, seperti sumber artikel, koran dan majalah baik yang online maupun media cetak.

Sumber sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh dari orang yang tidak terlibat secara langsung dengan suatu kejadian atau peristiwa. Sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa buku-buku penunjang lainnya yang terkait dengan judul penelitian karya ilmiah ini. Sumber sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah buku karangan Ayu Sutarto, yaitu Menjadi NU Menjadi Indonesia. Buku karya Deliar Noer, yaitu Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Buku karya Alamsyah Ratu Perwira Negara, yaitu Islam dan Perkembangan Politik di Indonesia. Buku karya Nur Khalik Ridwan, yaitu NU dan Bangsa 1914-2010. Buku karya KH. Saifuddin Zuhri, yaitu Guruku Orang – Orang Dari Pesantren, dan buku lainnya.

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah setelah melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder terkait dengan peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945 adalah melakukan kritik sumber. Menurut Gottschalk (1985:79), peneliti harus melakukan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah dari dua segi yakni, segi ekstern dan intern. Untuk segi ekstern penulis melakukan kritik pada identitas buku untuk mengetahui keaslian atau keotentikan sumber-sumber yang ada. Pada tahap ini peneliti melakukan perbandingan sumber yang didapat agar peneliti memperoleh sumber-sumber yang mengandung informasi yang akurat dan benar. Tujuan akhir dalam melakukan kritik adalah melaksanakan otentisitas dari sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh kegiatan kritik ekstern peneliti adalah sebagai berikut : pada buku Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim. Dari segi ekstern buku ini merupakan buku yang diterbitkan sezaman dengan judul peneliti, hal ini terlihat dari kertas buku, bahasa, dan tahun terbit, yaitu tahun 1958. Isi buku tersebut juga sezaman dengan masalah yang akan dibahas.

Selain melakukan kritik ekstern peneliti juga melakukan kritik secara intern. Kritik intern dilakukan agar mendapatkan fakta-fakta yang dibutuhkan dalam

penelitian. Dalam hal ini (kritik intern) dilakukan penilaian secara kritis sumber-sumber yang telah terkumpul. Untuk sumber-sumber yang berupa dokumen, buku, artikel dan surat kabar penulis melakukan perbandingan antar satu sumber dengan sumber lainnya, perbandingan tersebut berupa mengambil fakta-fakta yang sama terlebih dahulu dari 5 buku primer, setelah itu mengumpulkan fakta-fakta yang sama menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi fakta sejarah. Selain itu juga penulis membandingkan fakta-fakta yang berbeda dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan, fakta yang berbeda tersebut dianalisis terlebih dahulu untuk mencari keabsahaan dari fakta yang berbeda sehingga bisa memposisikan se-objektif mungkin tanpa ada rasa subjektif terhadap satu pihak dengan pihak lainnya, serta dengan adanya kritik intern ini bisa mengetahui apakah sumber yang digunakan tersebut sudah bisa menjadi fakta sejarah.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan interpretasi. Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta sejarah yang mempunyai kesesuaian satu sama lain yang kemudian dilakukan suatu penafsiran agar bermakna. Interpretasi dilakukan untuk menentukan makna yang saling berkaitan dalam fakta-fakta yang telah diperoleh. Fakta-fakta sejarah harus diinterpretasikan atau ditafsirkan agar sesuatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yakni dengan jalan menyeleksi, menyusun, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta dalam urutan kausal (Kuntowijoyo, 2003:103). Dengan demikian, tidak hanya pertanyaan dimana, siapa, bilamana, dan apa yang perlu dijawab, tetapi juga yang berkenaan dengan kata mengapa dan apa jadinya. Kegiatan interpretasi ini ialah suatu proses penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada untuk menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain yang telah terhimpun dan berhubungan dengan peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945. Fakta yang telah diperoleh selama ini akan dirangkai dan dihubungkan menjadi satu bentuk fakta yang rasional dan faktual berdasarkan pada aspek pemabahasan yang akan difokuskan oleh peneliti. Kegiatan interpretasi tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis

yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh selama ini terkait dengan peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945, sedangkan sintesis yaitu menghubungkan atau menyatukan data-data yang telah diperoleh sehingga ditemukan fakta sejarah (Kuntowijoyo, 2003:78). Jadi, yang dimaksud dengan interpretasi adalah kegiatan merangkai dan menghubungkan peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945 dengan fakta-fakta sejarah.

Penulis dalam hal ini melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul untuk dirangkai dan dihubungkan menjadi suatu bentuk yang logis, rasional, objektif, dan kausalitas. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan dipatkan oleh penulis akan dirangkai secara kronologis sehingga nantinya akan diperoleh suatu cerita sejarah yang logis dan sesuai realitas yang ada tentang peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah historiografi / penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Historiografi adalah kegiatan merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode sejarah (Gottschalk. 1985 : 32). Historiografi merupakan klimaks dari penelitian sejarah yaitu menulis hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti adalah menuliskan cerita sejarah tentang peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926 – 1945 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis dan objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis dan dapat diyakini kebenarannya.

Penyajian tulisan sejarah dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini tersusun dalam enam bab. Bab 1 menyangkut tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang memuat pendapat-pendapat

dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah lainnya mengenai Peran Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945, teori relevan terhadap penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun karya ilmiah skripsi ini, yang terdiri dari empat tahap metode penelitian sejarah yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Dalam bab ini dipaparkan dan dijelaskan mengenai cara-cara yang digunakan peneliti dalam hal mengumpulkan data-data dan sumber sejarah, menganalisis data, dan merekonstruksi fakta-fakta sejarah yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh, logis dan rasional. Bab 4 berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pergerakan nasional melawan penjajah di Indonesia. Bab 5 berisi tentang pola perjuangan Nahdlatul Ulama dalam pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dan Pendudukan Jepang. Bab 6 yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi karya ilmiah skripsi ini dan saran. Penutup, berisi kesimpulan (berisi jawaban atas permasalahan) dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara ringkas terkait dengan permasalahan yang peneliti ungkapkan terkait dengan pertanyaan yang terdapat pada bab 1. Sedangkan saran akan peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB 4. LATAR BELAKANG NAHDLATUL ULAMA BERPERAN DALAM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

Organisasi sosial keagamaan yang terbentuk pada abad ke 19 adalah Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 31 Januari 1926 di Jombang Jawa Timur. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dari kondisi rakyat Indonesia yang kala itu sedang dijajah oleh Belanda dan Jepang. Motivasi berdirinya Nahdlatul Ulama sendiri juga berkaitan erat dengan agama, dimana pada waktu penjajahan Belanda banyak terjadi penyebaran agama Kristen, akibatnya para ulama bersatu untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda dengan cara menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren. Pondok pesantren yang pertama kali dibangun adalah pondok Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur. Selain motif agama, Nahdlatul Ulama juga lahir karena dorongan untuk merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan. Nahdlatul Ulama berusaha membangunkan semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan. Selain motif agama dan nasionalisme, lahirnya Nahdlatul Ulama juga di dorong oleh semangat mempertahankan paham Ahlusunnah wal jama'ah yaitu paham yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits (Anam, 1985 : 18-37).

Pada masa penjajahan Belanda ini perjuangan dilakukan dengan berbagai cara mulai dari perjuangan yang bersifat lokal dan bersifat nasional dimana tujuan utamanya adalah bebas dari penjajahan dan tekad kuat untuk merdeka. Berbagai organisasi pergerakan nasional muncul seperti Budi Utomo yang merupakan tonggak awal kebangkitan nasional dan organisasi sosial keagamaan yang juga ikut andil dalam melawan penjajahan di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sendiri merupakan organisasi sosial keagamaan dengan tokoh nya yaitu KH. Hasyim Asy'ari yang juga merupakan pendiri pondok pesantren Tebuireng di Jombang Jawa Timur. Nahdlatul Ulama berdiri dengan motif keagamaan dengan melakukan

perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda karena sudah menyebarkan agama Kristen, semangat nasionalisme untuk merdeka, dan mempertahankan paham Ahusunnah wa jama'ah yang merupakan ajaran Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (lihat lampiran B Gambar 1 hal 92).

4.1 Nahdlatul Ulama Pada Zaman Penjajahan Belanda

Ketika bangsa Belanda berkuasa di Indonesia, kondisi bangsa Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan, serta jiwa nasionalisme masih relatif rendah. Fenomena tersebut ditandai dengan mudahnya bangsa Indonesia dihasut dan di adu domba antar rakyat Indonesia sendiri oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sejak awal pemerintahannya, Belanda dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang ada di Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Islam bagi Belanda adalah musuh yang harus di awasi secara ketat sedangkan bagi masyarakat Indonesia Belanda juga merupakan musuh bagi kaum Islam (muslim) dan dianggap kafir, sehingga harus dilawan. Pandangan Belanda terhadap penduduk pribumi yang beragama Islam menjadi buruk, karena Belanda selalu berprasangka buruk dan menganggap kaum pribumi tersebut merupakan ancaman bagi politik ekspansinya. Demikian juga penduduk pribumi menganggap bahwa Belanda merupakan ancaman bagi eksistensinya di segala bidang, sehingga berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman pemerintah kolonial Belanda.

Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan Islam dalam rangka memperkuat kekuasaannya. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengantisipasi perlawanan dari penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam, contohnya dalam hal ibadah haji. Belanda melakukan pembatasan terhadap orang Islam yang akan menunaikan ibadah haji, bahkan mempersulit dengan berbagai persyaratan untuk kepentingan politik pemerintah kolonial Belanda sendiri. Kebijakan pemerintah lainnya dalam rangka mengurangi kekuasaan Islam di Indonesia

adalah mulai melakukan penyebaran agama Kristen oleh misi-misi mereka yang tujuannya agar penduduk pribumi menjadi Kristen sehingga kedudukan Belanda di Nusantara menjadi kuat (Noer, 1991: 27-35). Hal itulah yang mendorong para pejuang pergerakan nasional dan kebangkitan ulama untuk melawan dan mengusir penjajah yang ada di Indonesia. Pada era ini pula banyak bermunculan berbagai organisasi sosial keagamaan yang pokok tujuannya adalah melawan dan mengusir penjajah di Indonesia, salah satu organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama dibentuk pada 16 Rojab 1344 H / 31 Januari 1926 dan merupakan organisasi modern Islam yang mewakili suatu tradisi perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk melestarikan lembaga-lembaga dan tradisi-tradisi Islam yang berorientasi kuat pada mazhab. Tradisionalisme Nahdlatul Ulama merupakan bentuk politik dan suatu aliran dalam Islam pesantren yang dekat dengan rakyat. Melalui organisasi inilah peran ulama terealisasi baik dalam hal merebut, memperjuangkan, dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk memahami latar belakang Nahdlatul Ulama berperan dalam pergerakan nasional Indonesia diuraikan sebagai berikut.

4.1.1 Peran di Bidang Politik

Sistem politik Adu Domba (Devide et Impera) yang digunakan pemerintah kolonial Belanda mampu memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia, bahkan dapat menghapus kekuasaan penduduk pribumi. Beberapa kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah di Indonesia satu demi satu dapat dikuasai oleh pemerintah Kolonial Belanda. Berbagai kebijakan – kebijakan telah di terapkan oleh Belanda guna memperparah keadaan politik Indonesia. Pada waktu itu dengan diterapkannya kebijakan politik kolonial Belanda di Indonesia, maka masuk pula pengaruh Belanda dalam bidang struktur birokrasi Indonesia. Perubahan sistem birokrasi turut mengubah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan tersebut baru terlaksana setelah Indonesia dikuasai oleh Belanda.

Birokrasi tradisional yang ada di Indonesia berubah secara menarik dalam masa penjajahan. Pejabat birokrasi tradisional ini di Jawa disebut kaum priyayi. Dalam proses interaksi antara kaum priyayi dan penguasa Belanda timbul hubungan yang kas, bahwasannya para priyayi yang sebelumnya merupakan alat kekuasaan para sultan di keraton berubah menjadi alat perantara dari pihak Belanda. Birokrasi tradisional ini tampak beralih dari keraton ke para residen. Proses ini dimulai dengan ketentuan bahwa Patih di keraton harus tunduk pada Batavia dan para Bupati (priyayi) di kabupaten – kabupaten juga demikian. Ketentuan seperti ini kemudian diperluas dan berlaku sampai ke daerah – daerah lain di Jawa. Dengan demikian, kaum priyayi kini hanya menjadi bagian dari birokrasi Hindia Belanda (Leirissa, 1985 : 9 – 15). Menyadari akan bahaya politik adu domba yang diterapkan Belanda dan kaum priyayi yang hanya menjadi Boneka kepentingan Belanda di Indonesia membuat Organisasi Nahdlatul Ulama mengambil sikap bersebarangan dan bermusuhan dengan Belanda. Hal ini tentu menjadi komitmen NU untuk mengecam aksi imperialisme dan menunjukkan sikap nasionalisme yang tinggi.

Peranan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936. Pada saat itu ditetapkan kedudukan Hindia Belanda (Indonesia) sebagai Dar al-Salam, yang menegaskan keterikatan Nahdlatul Ulama dengan nusa bangsa. Meskipun disadari peraturan yang berlaku tidak menggunakan Islam sebagai dasarnya, akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak mempersoalkan, karena yang terpenting adalah ummat Islam dapat melaksanakan syariat agamanya dengan bebas.

Pada perkembangan selanjutnya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama mulai terlibat secara aktif dalam dunia politik. Hal ini terlihat pada saat tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama ikut memprakarsai lahirnya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937, yang kemudian dipimpin oleh KH. A. Wahid Hasyim. Ide mendirikan MIAI tidak bisa lepas dari kerangka usaha pengembangan Nahdlatul Ulama dalam perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebab baik dilihat dari sudut historis maupun semangat yang membentuk diri MIAI menjadi besar, tidak pernah

lepas dari peranan Nahdlatul Ulama. MIAI pada dasarnya bergerak di bidang keagamaan, namun dalam setiap aktivitasnya sarat dengan muatan politik. MIAI berusaha mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik, melalui pengajuan tuntutan kepada penguasa, baik mengenai hal-hal yang secara langsung terkait dengan masalah keagamaan maupun tidak, bahkan masalah internasional. Tuntutan tersebut antara lain : Indonesia berparlemen, persoalan Palestina dan mencabut Guru Ordonantie tahun 1925.

Pada masa penjajahan Belanda sikap Nahdlatul Ulama jelas, yaitu menerapkan politik non cooperation (tidak mau kerjasama) dengan Belanda. Untuk menanamkan rasa benci kepada penjajah para ulama mengharamkan segala sesuatu yang berbau Belanda sehingga semakin menumbuhkan rasa kebangsaan dan anti penjajahan. Hal ini terlihat ketika Nahdlatul Ulama menolak mendudukkan wakilnya dalam Volksraad (DPR masa belanda).

4.1.2 Peran di Bidang Sosial

Masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda dibedakan dalam beberapa golongan atau garis warna. Garis warna atau perbedaan warna kulit pada tanah jajahan sangat ketat diberlakukan oleh penjajah. Pemerintah kolonial Belanda membagi golongan sosial Indonesia berdasarkan pada keturunan atau status sosial. Pembagian masyarakat menurut keturunan atau status sosial terdiri atas beberapa golongan antara lain 1) bangsawan (aristocrat); 2) pemimpin adat; 3) pemimpin agama; dan 4) rakyat biasa.

Penggolongan masyarakat juga didasarkan pada perbedaan ras adalah sebagai berikut, pertama Golongan Eropa yakni meliputi orang Belanda, Inggris, Amerika, dan lain-lain. Status sosial mereka merupakan status sosial yang paling tinggi. Kedua, Golongan Asia Timur Asing yakni meliputi bangsa Cina, India, dan Arab. Mereka memiliki kedudukan status sosial yang lebih tinggi dari kaum pribumi. Ketiga Golongan Pribumi, yaitu kelompok mayoritas dan merupakan penduduk asli Indonesia. Posisi Indonesia yang berada pada urutan terakhir tetap saja dibedakan.

Status sosial orang-orang pribumi ini adalah yang paling rendah dari lainnya. Kedudukan orang-orang pribumi tersebut dalam perkembangannya dibedakan pula pada aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa kedatangan Belanda ke bumi Nusantara tidak hanya bermaksud mengeruk kekayaan bumi melainkan juga membawa misi Kristen dengan mendirikan jemaat Katholik sebagai jembatan untuk melakukan proses Kristenisasi kepada bangsa Indonesia yang umumnya memeluk agama Islam. Setelah diketahui maksud sebenarnya penjajah Belanda yang tidak hanya menjajah fisik, tetapi menjadikan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pengabar Injil, maka munculah perlawanan dari pemimpin bangsa khususnya pemuka agama seperti para ulama atau kyai yang secara terus menerus mengorganisasi para pengikutnya untuk melawan penjajah. Perlawanan para ulama ini semakin keras ketika secara terang-terangan pemerintah Belanda memberlakukan Kristening Politiek atau kebijakan menasranikan bangsa Indonesia di awal abad ke XX.

Tindakan nyata pemerintah Belanda dalam usaha melakukan Kristening Politiek diwujudkan dalam memberikan bantuan secara besar-besaran baik moril, materil, maupun finansial kepada misi Khatolik dan Zending Protestan. Misi dan Zending itu kemudian membangun sekolah-sekolah dan memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dan pembangunan rumah sakit bagi Indonesia. Para ulama mulai menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren atau mendirikan organisasi-organisasi keagamaan, salah satunya Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 di Jombang, Jawa timur (Anam, 1985: 18-20).

Peran organisasi Nahdlatul Ulama di bidang sosial ini lebih difokuskan pada aspek keagamaan yang berbentuk pada dakwah dan penguatan keislaman. Tentunya hal ini dilakukan karena menyikapi Kristenisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap bangsa pribumi. Sehingga hal tersebut sangat diperlukan untuk

membendung arus para missionaris Kristen dalam menyebarkan paham agama lain selain Islam.

Dalam hal Dakwah, Nahdlatul Ulama menempatkan para pendakwahnya disetiap pelosok nusantara untuk menyebarkan agama Islam dan menguatkan keagamaan. Hal ini dilakukan karena memang proses Kristenisasi juga tidak lepas dari pihak missionaris yang bertebaran di pulau Jawa. Kegiatan dakwah ini tentunya menjadi komitmen Nahdlatul Ulama untuk terus menjaga agama Islam sebagai agama pribumi dan tetap menanamkan jiwa nasionalisme kedalam setiap jiwa penduduk untuk terus mencintai dan memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi hanya dengan kemerdekaan sejati lah kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat bisa terjamin dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam bidang penguatan keislaman yang dilakukan organisasi Nahdlatul Ulama tidak bisa melepas peran para Da'i mereka yang terus menerus menyebarkan agama Islam, hal itu tentunya menjadi satu kesatuan utuh dari tugas para Da'i yang diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat, selain menyebarkan agama Islam mereka juga punya peran penguatan keagamaan dan nasionalisme. Sehingga menjadi penguat dan pembendung paham-paham Kristen dan liberal yang disebarkan oleh missionaris Kristen.

4.1.3 Peran di Bidang Pendidikan

Pada abad ke – 19 karena dipengaruhi oleh pemikiran – pemikiran rasional, pendidikan yang bersifat keduniaan dipisahkan dari pendidikan agama. Sistem pendidikan yang mulai dibangun di beberapa tempat di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusatenggara, dan Maluku itu menekankan hal – hal yang rasional yang berhubungan dengan duniawi. Masalah – masalah yang berhubungan dengan agama dikeluarkan dari sistem sekolah. Selain itu sistem sekolah yang mula – mula hanya diciptakan untuk masyarakat Eropa di kota – kota besar juga mulai dibuka di Indonesia untuk kaum priyayi.

Dalam masalah edukasi lainnya, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk kalangan pribumi, namun pada kenyataannya sekolah-sekolah yang didirikan ini ternyata tidak menjadi sebuah sarana pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan yang disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para penduduk pribumi membaca, berhitung, dan menulis. Setelah lulus dari sekolah, akhirnya penduduk pribumi dipekerjakan sebagai pegawai kelas rendah untuk kantor-kantor Belanda di Indonesia. Suatu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang oleh umat Islam dirasakan sangat berat yaitu ordonansi guru.

Ordonansi yang pertama pada tahun 1905 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama Islam. Ordonansi kedua dikeluarkan pada tahun 1925, yaitu hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Pada tahun 1925 ini pula pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Ordonansi guru tersebut tidak hanya berlaku bagi pembatasan tugas para guru agama atau muballigh saja, akan tetapi juga berlaku bagi penempatan Bupati beserta bawahannya di Jawa, dan kepala adat dimana saja berwenang mengatur urusan agama Islam. Padahal kenyataannya mereka itu kurang paham bahkan tidak mengerti terhadap hukum – hukum Islam. Dari sinilah Nahdlatul Ulama merespon dengan pergerakan perlawanannya di bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren dan madrasah ataupun sekoah swasta.

Peran Nahdlatul Ulama dalam pendidikan inilah yang akan mengubah pola perjuangan masyarakat Indonesia selama ini. Di bidang pendidikan inilah NU lebih memfokuskan pada dunia pesantren. Pendidikan di dalamnya hanya membahas mengenai ilmu agama dan nasionalisme, sehingga penguatan keislaman dan paham nasionalisme terus dilaksanakan demi menjaga stabilitas perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Dalam pendidikan inilah Nahdlatul Ulama terus berkomitmen dan menunjukkan sikap perjuangan lewat pendidikan dengan terus

menambah jumlah pesantren-pesantren dan madrasah di nusantara. Hal ini dilakukan demi mengimbangi jumlah sekolah buatan Belanda yang hanya diisi oleh kaum bangsawan dan priyayi, serta pendidikan yang isinya tidak memasukkan mata pelajaran agama di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa Ordonansi sekolah liar tahun 1932 ini merupakan awal penyimpangan kearah preventif yang mengandung arti bahwa izin untuk menyelenggarakan pengajaran bisa ditolak jika terdapat dugaan bahwa pengajaran yang diberikan akan membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Apabila dilihat dari sudut kebangsaan nampak jelas bahwa ordonansi ini ditujukan untuk mematikan semangat nasional yang dikembangkan di sekolah – sekolah Islam pada waktu itu. Oleh karna itu, hanya sebagian kecil saja dari lembaga – lembaga pendidikan swasta yang memenuhi peraturan ordonansi sekolah liar tersebut, termasuk Taman siswa.

Keadaan politik, sosial, dan pendidikan pada zaman penjajahan Belanda telah banyak membawa dampak bagi rakyat Indonesia. Dampak yang di hasilkan ada yang negatif dan ada pula yang positif. Dari berbagai faktor dan kondisi yang memperparah keadaan bangsa Indonesia, Perjuangan para tokoh nasional dan agama dalam mendapatkan kemerdekaan tidaklah mudah dilakukan. Mereka sama-sama berjuang hingga darah penghabisan demi mendapatkan kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 serta mempertahankan kemerdekaan tersebut. Khusus dalam bidang pendidikan pada masa penjajahan kolonial Belanda para ulama mengajarkan pendidikannya melalui dunia pesantren . Pesantren yang pertama kali dibangun adalah Tebuireng yang berada di Jombang Jawa Timur. Selain belajar megenai agama Islam, para ulama juga mengajarkan tentang semangat nasionalisme dalam melawan dan mengusir penjajahan.

4.2 Nahdlatul Ulama Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada bulan Maret 1942, Jepang mulai menancapkan penjajahannya di Indonesia menggantikan kekuasaan Hindia Belanda. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada awalnya di sambut hangat oleh rakyat Indonesia. Sambutan hangat itu segera berubah menjadi kebencian setelah diketahui maksud Jepang datang ke Indonesia tidak lebih baik dari Belanda. Jepang justru bertindak kejam, brutal, dan tidak segan – segan menghukum rakyat Indonesia yang daianggapnya membangkang dan melawan. Semula para pemimpin keagamaan pun menyambutnya dengan ramah. Para tokoh agama berharap kedatangan Jepang akan bisa memberikan kelonggaran dalam mengurus soal waris, perkawinan, dan dakwah. Namun harapan – harapan itu lenyap ketika Batavia jatuh ke tangan Jepang pada awal Maret 1942. Seminggu, setelah menguasai Batavia, Kolonel Horie berpidato dan menyatakan dirinya diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi kepala Kantor Urusan Agama (Shumubu). Kolonel Horie juga menjelaskan, bahwa ia akan segera menjalankan tugasnya mengurus tempat – tempat ibadah, mempelajari masalah Islam baik dari segi hukum, budaya maupun aktivitas keagamanya. Kolonel Horie juga menjelaskan bahwa Shumubu berada dibawah kekuasaan tentara Dai Nippon, oleh karena itu rakyat Indonesia harus setia dan menuruti kemauan militer Jepang yang sedang berkuasa.

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa Kedatangan tentara Jepang disambut dengan gembira dan penuh sukacita oleh bangsa Indonesia, karena dianggap akan membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda dan juga memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada zaman Jepang banyak organisasi – organisasi yang dibentuk antara lain Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), Pembela Tanah Air (PETA), Jawa Hokokai, dan lain sebagainya. Organisasi PUTERA dipimpin oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan KH. M. Mansur serta tugas Poetra adalah memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 3 Oktober 1943 lahirlah PETA (Tentara Pembela Tanah Air) yang fungsinya

untuk melatih pemuda-pemuda dalam bidang kemiliteran. Pemuda – pemuda dididik menjadi tentara Jepang dengan nama “Seinendan” (barisan pemuda) dan “Keibodan” (pembantu polisi keamanan desa). Atas persetujuan pemerintah Jepang dibentuk oleh para ulama/kyai barisan Hizbullah dan Sabilillah yang berfungsi untuk melatih pemuda – pemuda Islam dalam peperangan. Hal itu dimanfaatkan oleh para ulama untuk melawan pemerintah Jepang guna merebut kemerdekaan Indonesia. Sikap para ulama sendiri terhadap Jepang awalnya sangat hangat dan menerima dengan baik akan tetapi setelah mengetahui maksud Jepang yang sebenarnya, justru para ulama mengadakan perlawanan dengan cara memasuki ranah politik Jepang. Sebagai contohnya pemerintah Jepang mengangkat tokoh Nahdlatul Ulama yaitu KH. Hasyim Asy’ari sebagai ketua di Kantor Urusan Agama (Shomubu) menggantikan ketua sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan keinginan seluruh rakyat Indonesia yaitu bebas dari belenggu penjajahan dan mendapatkan kemerdekaan, sehingga kemerdekaan tersebut berhasil di dapatkan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

4.2.1 Peran di Bidang Politik

Pada masa Jepang ini Nahdatul Ulama semakin menunjukkan sikap lunak dan diplomatis setelah diaktifkan kembali atas persetujuan Jepang. Oleh karena itu sikap NU terhadap Jepang tidak sekeras terhadap Belanda. Apabila pada masa kolonial Belanda NU menolak duduk dalam pemerintahan, maka pada zaman Jepang NU justru memanfaatkan isu kolaborasi dengan Jepang dalam bentuk apapun khususnya dalam bidang politik. Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya KH. Hasyim Asy’ari sebagai ketua Kantor Urusan Agama (Shumubu). KH. A. Wahid Hasyim dan beberapa ulama lain masuk sebagai anggota Chuo Sangi-in (parlemen buatan Jepang). Jepang mengizinkan Nahdlatul Ulama diaktifkan kembali dan pada bulan September 1943.

Pada akhir Oktober 1943 Perjuangan diplomasi terus ditingkatkan melalui berdirinya wadah perjuangan baru bagi umat Islam Indonesia yang bernama (Majelis Syura Muslim Indonesia) Masyumi. Masyumi adalah kelanjutan dari MIAI yang di

bubarkan Jepang. Sementara di bidang politik, selain aktif dalam Masyumi KH. A. Wahid Hasyim juga duduk sebagai pimpinan tertinggi Shumubu (kantor urusan agama) menggantikan KH. Hasyim Asy'ari. Shumubu pada awalnya dipimpin oleh kolonel Horrie yang bertugas mengawasi secara ketat organisasi – organisasi Islam terutama terhadap pendidikan Islam.

Sikap menentang keras Nahdlatul Ulama terhadap Jepang terlihat ketika ada perintah untuk melakukan Seikerei (ritual penghormatan kepada Tenno Heika dengan posisi siap membungkukkan badan 90 derajat semacam rukuk dalam sholat). KH. Hasyim Asy'ari menyerukan kepada seluruh umat Islam khususnya warga Nahdlatul Ulama untuk tidak melakukan Seikerei karena hukumannya haram. KH. A. Wahid Hasyim tidak henti – hentinya mengadakan kontak dengan para tokoh nasionalis guna mendesak Jepang segera mewujudkan janji kemerdekaan yang pernah diucapkan. Perjuangan mereka berhasil hingga pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidik usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Selanjutnya KH. A. Wahid Hasyim juga terlibat aktif dalam perumusan konstitusi dan dasar negara bersama tokoh lain yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoeseno Tjokrosoejoso, H. Agus Salim AA Maramis dan Abdul Kahar Muzakir yang disebut panitia sembilan. Mereka membubuhkan tanda tangannya pada piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Preamble atau pembubukan Undang – Undang Dasar dalam naskah pembukaan itulah disebutkan bahwa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia telah menjadi salah satu bukti bahwa Nahdlatul Ulama memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dan langsung terjun dalam perpolitikan di Indonesia.

4.2.2 Keadaan Sosial

Pada zaman pendudukan Jepang terjadi mobilisasi lainnya dalam jumlah yang sangat besar sebagai akibat dari pengerahan total Jepang yakni romusha. Pengerahan romusha merupakan eksploitasi pekerja kasar, terutama pemuda untuk menunjang

perang Jepang melawan Sekutu yang menimbulkan banyak penderitaan dan korban jiwa bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan pengerahan romusha dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya di Yogyakarta, tepatnya di desa Timbul Harjo, Bantul, pengerahan romusha dilakukan oleh perangkat desa dengan cara mendatangi keluarga – keluarga yang memiliki tenaga potensial untuk dijadikan romusha. Di Kabupaten Gunung Kidul, para calon romusha disuruh datang ke kelurahan pada pagi maupun malam hari dan dilarang pulang sekalipun hanya untuk mengambil pakaian.

Selama berada di tempat kerja sampai pulang ke kampung halamannya, ternyata romusha mendapat fasilitas yang sangat minim dan banyak yang tidak diberi upah, tetapi mereka semua tidak dapat menuntut akan hal tersebut karena memang tidak ada perjanjian tertulis sebelumnya. Mereka semua dikerahkan menjadi tenaga paksa dan buruh yang di beri upah selayaknya saja. Para tenaga kerja yang disebut romusha tersebut diperlukan untuk membangun prasarana perang seperti kubu – kubu pertahanan, gudang senjata, jalan raya, dan lapangan udara. Selain itu juga, mereka dipekerjakan di pabrik – pabrik seperti pabrik garam dan pabrik kayu di Surabaya dan Sumatera Selatan. Mereka juga di pekerjakan di pabrik pembuatan dinamit di Talangbetutu atau di pertambangan batu bara serta penyulingan minyak. Selain itu, mereka juga dipekerjakan di pelabuhan – pelabuhan antara lain untuk memuat dan membongkar barang – barang dari kapal – kapal. Di desa Gendeng, Yogyakarta para romusha disuruh untuk menanam sayuran dan palawija untuk memenuhi kebutuhan makan Jepang romusha itu sendiri (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 61-62).

Peran Nahdlatul Ulama pada masa pendudukan Jepang bidang sosial ini tidak terlalu banyak dilakukan tidak seperti pada masa penjajahan Belanda yang memfokuskan pada status sosial masyarakat. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang ini peran Nahdlatul Ulama hanya fokus pada perlawanan dan perjuangan untuk membebaskan atau mensejahterakan para pekerja yang dipekerjakan oleh jepang (Romusha) sebagaimana yang diuraikan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kondisi sosial masyarakat pada waktu itu sangat meprihatinkan karena harus menjadi pekerja paksa yang tidak diupah dan diperlakukan semena-mena oleh pihak Jepang

yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh selama pelaksanaan romusha yang diterapkan oleh pihak Jepang.

Langkah yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama adalah dengan mengharamkan sistem pekerjaan paksa (romusha) yang diterapkan oleh Jepang yang melarang warga pribumi untuk menolak ajakan pemerintah Jepang untuk menjadi pekerja proyek Jepang. Sedangkan langkah lainnya adalah dengan melakukan diplomasi terus-menerus dengan pihak pemerintah Jepang terkait kesejahteraan rakyat sebagai pekerja paksa Jepang, dengan cara meminta pemerintah Jepang untuk menghargai dan memanusiawikan para pekerja mereka yang sedang melaksanakan perintah. Sehingga mereka tidak hanya menjadi alat saja, melainkan sebagai manusia yang harus dipenuhi segala kebutuhan pokoknya.

4.2.3 Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi pada zaman pendudukan Jepang diarahkan untuk kepentingan perang. Sejalan dengan perkembangan keamanan, pemerintah Jepang mengambil alih semua kegiatan dan pengendalian ekonomi di Indonesia. Langkah pertama adalah rehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat – alat transportasi, dan telekomunikasi. Beberapa peraturan yang bersifat kontrol terhadap kegiatan ekonomi dikeluarkan. Untuk mencegah meningkatnya harga barang dan timbulnya berbagai manipulasi, maka dikeluarkan pula peraturan tentang pengendalian harga dan hukuman yang berat bagi pelanggarnya.

Harta milik bekas musuh disita dan menjadi hak milik pemerintah Jepang. Harta yang disita antara lain perkebunan – perkebunan, bank – bank, pabrik – pabrik, perusahaan – perusahaan vital yang terdiri dari pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Mengenai perkebunan dikeluarkan Oendang – Oendang No. 322/1942, yang didalamnya menyatakan bahwa Gunseikan (Kepala Pemerintah Militer) langsung mengawasi perkebunan – perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Pelaksanaan pengawasan perkebunan – perkebunan tersebut diserahkan kepada sebuah badan pengawas yang dibentuk oleh Gunseikan dan bernama Saibai Kigyo

Kanrikodan (SKK). SKK ini selain bertindak sebagai pengawas juga bertindak sebagai pelaksana pembelian dan penentuan harga penjualan hasil perkebunan tersebut. Sebagai pelaksana penguasaan perkebunan – perkebunan itu ditunjuk beberapa perusahaan swasta Jepang.

Sebagai project pertama Jepang di Indonesia adalah usaha untuk menghasilkan lebih banyak lagi hasil bahan pangan, maka mulai dilakukanlah beberapa pengajaran seputar pertanian. Cara menanam benih secara tradisional yang seenaknya diubah menjadi cara tanam baris-berbaris, sehingga akan terdapat ruang yang ada di sela-sela padi dan meminimkan petani untuk menginjak padi yang telah ditanam. Introduksi bibit padi yang baru mulai dilakukan, teknik - teknik baru untuk menanam padi mulai digunakan, dan cara-cara baru untuk membuat pupuk kompos dari sampah buangan mulai dipraktekkan. Cara yang sama juga diterapkan dalam bidang peternakan. Kabar gembira ini tak berlangsung lama, rupanya rakyat Indonesia belum mengetahui bahwa tujuan utama Jepang memajukan sektor ekonomi Indonesia semata hanya untuk menunjang kepentingan perang Jepang.

Melihat kenyataan yang ada di bidang ekonomi ini, organisasi Nahdlatul Ulama menunjukkan perannya sebagai organisasi sosial yang bergerak tidak hanya di bidang agama saja, melainkan juga memperhatikan ekonomi rakyat. Ini menjadi reaksi dari adanya sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah jepang yang tentunya sangat merugikan rakyat pribumi. Ekonomi yang ditunjukkan oleh Nahdlatul Ulama adalah dengan mendirikan perserikatan dagang bersama serta ekonomi sitem koperasi. Dalam hal perserikatan dagang ini Nahdlatul Ulama lebih memfokuskan pada sistem perdagangan Islam, dan yang menjadi anggota perserikatan ini adalah para pedagang muslim dan tentunya yang menjadi lahan pasar adalah penduduk pribumi sendiri yang tentunya akan saling memberikan keuntungan di masing-masing pihak, tidak seperti ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang yang mana hanya menguntungkan pihak Jepang dan merugikan pihak pribumi.

Sedangkan dalam hal koperasi Islam yang diterapkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama adalah dengan mendirikan suatu badan koperasi yang didalamnya juga menggunakan sistem simpan pinjam dan penyimpanan Islam, hal ini dilakukan agar rakyat pribumi bisa menikmati sistem ekonomi yang sama-sama memberikan keuntungan dan kenyamanan dalam bertransaksi, sehingga hal tersebut akan terus menguatkan sistem ekonomi lokal dan bisa menjadi pembendung dan perlawanan di bidang ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Jepang.

4.2.4 Keadaan Pendidikan

Pada zaman pendudukan Jepang, kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan sangat menurun dibandingkan pada zaman penjajahan Belanda. Perbandingan ini terlihat jelas seperti penurunan jumlah sekolah dasar dari 21.500 menjadi 13.500, jumlah sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20, dan perguruan tinggi/fakultas hanya terdiri dari 4 buah saja. Selanjutnya Jumlah murid sekolah merosot sebanyak 30%, murid sekolah menengah juga merosot 90 %, guru-guru sekolah dasar juga ikut berkurang 35%, dan guru sekolah menengah yang masih aktif hanya tinggal 5% saja.

Pada masa ini pula pendidikan tingkat dasar dijadikan satu macam saja yakni sekolah dasar 6 tahun. Sebenarnya Jepang mengadakan penyeragaman itu adalah hanya untuk memudahkan pengawasan terhadap sekolah – sekolah tersebut, baik dalam isi maupun hal penyelenggaraannya. Penyeragaman tersebut menguntungkan bagi Indonesia terutama dilihat dari segi pendidikan itu sendiri yaitu berarti menghapuskan diskriminasi. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan kepada keperluan Perang Asia Timur Raya.

Pada zaman pendudukan Jepang ini terdiri dari sekolah umum dan sekolah guru. Sekolah umum sendiri terdiri dari tiga jenis yakni: 1) sekolah rakyat enam tahun (kokumin gakko), di samping itu masih ada lagi sekolah desa atau sekolah pertama; 2) sekolah menengah pertama tiga tahun; 3) sekolah menengah tinggi tiga tahun. Sedangkan sekolah guru juga terdiri dari tiga tahun: 1) sekolah guru dua tahun

(shoto shihan gakko); 2) sekolah guru empat tahun (cuto shihan gakko); 3) sekolah guru enam tahun (koto shihan gakko) (Poesponegoro&Notosusanto, 2008: 91-92).

Dalam bidang pendidikan ini peran Nahdlatul Ulama tidak jauh berbeda dengan perjuangan dan pergerakan organisasi mereka pada masa penjajahan Belanda, yaitu tetap memfokuskan diri pada pendidikan dunia pesantren, yang didalamnya memang hanya memfokuskan diri pada pembelajaran agama dan penguatan nasionalisme. Yang membedakan hanya pada jumlah lembaga pendidikan yang pada masa pendudukan Jepang semakin banyak, karena memang kesediaan akan pendidikan rakyat Indonesia semakin meningkat. Apalagi ditambah dengan semangat perjuangan untuk memerdekakan diri dari para penjajah, termasuk Jepang sendiri. Sehingga hal ini menjadi keuntungan bagi Nahdlatul Ulama untuk terus berkiprah dan menunjukkan jati diri sebagai organisasi yang bergerak di bidang agama dan sosial untuk terus menguatkan paham agama Islam dan ikut membela perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

BAB 6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pertama, latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pergerakan nasional di Indonesia di pengaruhi oleh kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Adanya proses Kristenisasi, eksploitasi ekonomi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di Indonesia, penanaman budaya barat kedalam sekolah-sekolah di Indonesia, dan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang mengakibatkan para ulama bangkit dan merasa perlu ikut campur dalam menghadapi dan mengusir penjajah dari Indonesia. Nahdlatul Ulama yang pada awalnya lahir sebagai organisasi keagamaan menitikberatkan pada masalah lainnya merasa perlu terjun langsung dalam membela dan membebaskan tanah air dari belenggu penjajah bangsa asing yang ada di Indonesia.

Kedua, pola perjuangan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang sudah terealisasikan. Pada masa penjajahan Belanda Nahdlatul Ulama menolak usulan agar anggotanya menjabat didalam Volksraad. Nahdlatul Ulama juga menerapkan sistem non kooperatif dengan menolak tawaran Belanda untuk ikut andil dalam kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Namun, Pada tanggal 12 – 15 Rojab 1356 H/ 18 - 21 September 1937 empat orang tokoh pimpinan pergerakan Islam yakni KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas Mansur, dibantu W. Wondoamiseno mengadakan rapat yang bertempat di Pondok Kebondalem Surabaya dan berhasil membentuk badan federasi perkumpulan Islam bernama “ *Al Majlisul Islamil A’laa Indonesia*” disingkat MIAI. Nahdlatul Ulama sendiri secara resmi masuk menjadi anggota MIAI pada tahun 1939.

Ketika awal penjajahan Jepang, aktivitas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah dibekukan, maka dengan adanya Chuo Sangi In, KH. A. Wahid Hasyim dan tokoh lainnya membujuk Jepang agar segera mencairkan kembali aktivitas kedua

organisasi tersebut. Pada bulan September 1943 Jepang secara resmi mengizinkan dan mengakui aktifnya kembali organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada tanggal 22 November 1943 atas prakarsa kedua organisasi tersebut lahirlah Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) sebagai badan federasi organisasi Islam sekaligus menggantikan kedudukan MIAI yang bubar bersamaan terbentuknya Masyumi. Pada masa pendudukan Jepang Nahdlatul Ulama lebih memilih bersikap kooperatif dengan memanfaatkan isu kolaborasi dengan pemerintahan Jepang. Nahdlatul Ulama bersikap lebih lunak terhadap Jepang dan menjalin kerjasama dengan pemerintahan Jepang.

6.2 Saran

Dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut;

1. bagi mahasiswa pendidikan sejarah hendaknya lebih banyak membaca literatur yang berkaitan dengan sejarah pergerakan bangsa Indonesia sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dimiliki;
2. bagi almamater, hendaknya menambah literatur - literatur yang berkaitan dengan sejarah pergerakan Indonesia yang dilakukan oleh organisasi Islam di Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama;
3. bagi pembaca, hendaknya memberi saran dan kritik apabila penulisan karya ilmiah tentang Peran Nahdlatu Ulama dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1926-1945 terdapat kekurangan yang nantinya bisa diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. 1982. *I'tiqod Ahlusunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah
- Aboebakar, A. 1959. Sedjarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim. Djakarta: Panitia Buku Peringatan alm. KH. A. Wahid Hasjim.
- Abdurrahman, D. 2007. Metodologi Penelitian Sejarah. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Anam, C. 1985. Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatulm Ulama Surabaya: Jatayu Natala.
- Anshari, E. S. 1997. Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basri, M. H. 1994. *KHR. As'ad Syamsul Arifin (Riwayat Hidup dan Perjuangannya)*. Surabaya: Sahabat Ilmu.
- Budiyono, 1998. Pola Pengendalian Pemerintah Jepang Terhadap Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1942-1945. Tidak Diterbitkan. Laporan Penelitian. Jember. Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Benda, H. J. 1980. Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bruce, J. C. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar, terjemahan oleh Sahat Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Duverger, M. 1998. Sosologi Politik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gootschalk, L. 1969. Mengerti Sejarah. Terjemahan Oleh Nugroho Notosusanto 1985. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Halim, KH. A. Tanpa Tahun. Sejarah Perjuangan KH. A. Wahab Hasbullah. Bandung: PT. Baru.
- Hanaf, A. 1950. *Kyai Hasyim Asy'ari Bapak Umat Islam Indonesia*. Jombang: Pondok Tebuireng.

- Hayat, W, dkk. 1955. Peranan Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan. Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.
- Kartodirdjo, S. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. 1975. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Depdikbud.
- Kartodirdjo, S. 1975. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Depdikbud.
- Kuntowijoyo, 2003. Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Leirissa, R. Z. 1985. Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 – 1950. Jakarta: CV. AKADEMIKA PRESSINDO.
- Latief, H. Tanpa Tahun. *NU Penegak Panji Ahlusunnah Wal Jama'ah*. Surabaya: LP. Ma'arif Jawa Timur.
- Mahfoedz, M. 1982. Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama. Surabaya. YKU.
- Mahmudi, A. 2014. “ Peran Nahdlatul Ulama dalam Pembentukan Ideologi Negara Republik Indonesia”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mansur, A.M. 1995. Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Anonim: Mizan.
- Materu, M.S.D. 1985. Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Murfianti, D. 2012. “Peran Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1936-1945”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Nasikun. 1995. Sistem Sosial di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Noer, D. 1980. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

- Notosusanto, N. 1979. Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Dekker, N.1975. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Malang: Almamater YPTP IKIP Malang.
- Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. 2008. Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawiranegara, H A.R. 1986. Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pringgodikdo, A.K. 1949. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Ridwan, N.K. 2010. NU dan Bangsa 1914-2010, Pergulatan Politik dan Kekuasaan. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sjamsuddin, H. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
- Sitompul, E.M. 2010. NU dan Pancasila. Yogyakarta: LKis.
- Soekanto, S. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soekardi, H. 1980. *Kyai Haji Hasyim Asyi'ari*. Jakarta: Dep P & K.
- Suharno, S. Tanpa Tahun. Sejarah Kelahiran dan Perjuangan Nahdlatul Ulama. Jakarta: LAKPESDAM
- Sutarto, A. 2005. Menjadi NU Menjadi Indonesia. Jember; Kompyawisda.
- Tirtoprojo, S. 1984. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Jakarta: PT Pembangunan.
- Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Zuhri, S. 1974. Guruku Orang-Orang dari Pesantren. Yogyakarta: LKis.
- Zuhri, S. 1987. Berangkat dari Pesantren. Jakarta: Gunung Agung.

Zuhri, S. 1979. Sejarah Kebangkitan Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia.
Bandung: PT. Al-Ma'arif.



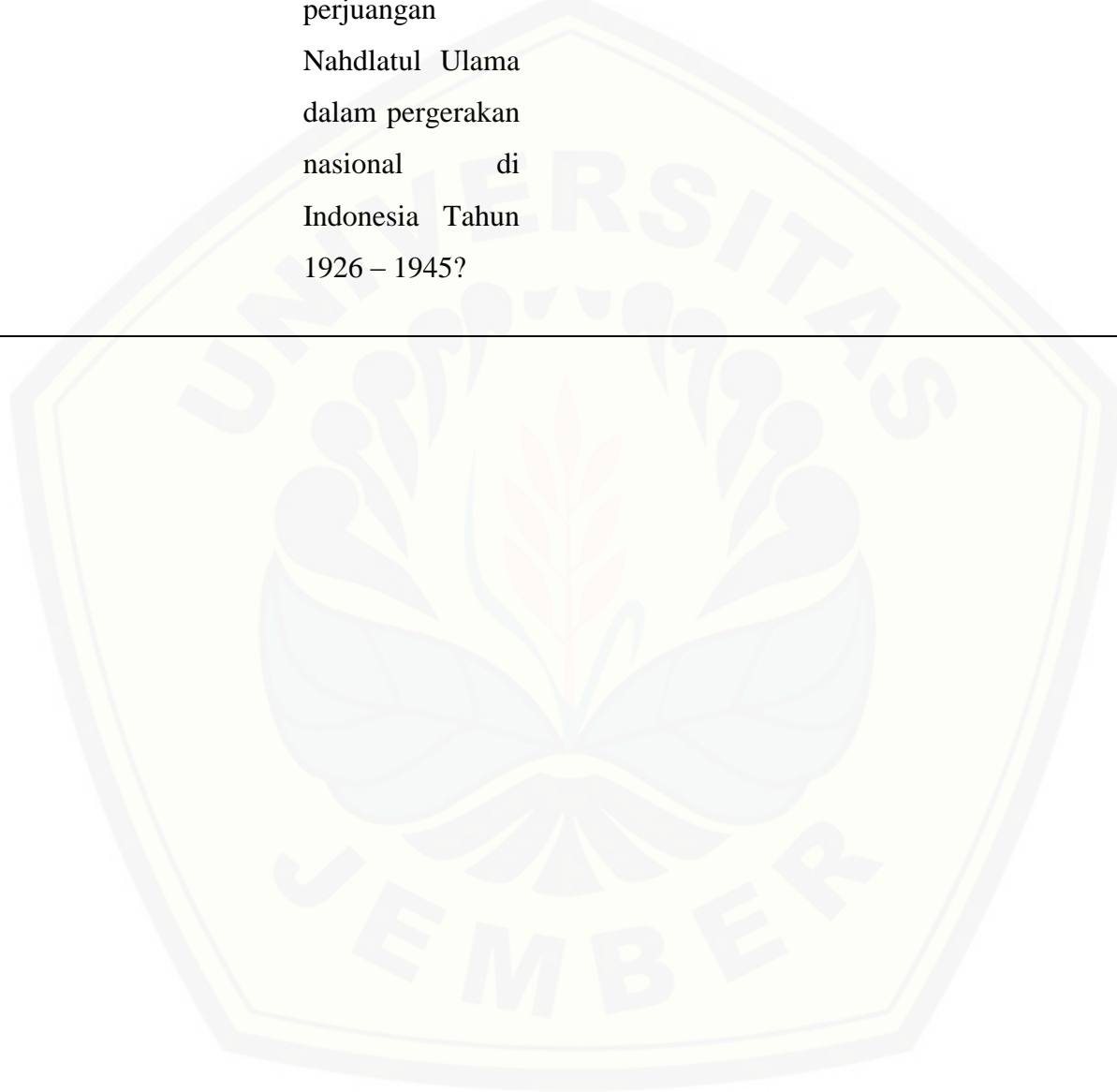
LAMPIRAN A

MATRIKS PENELITIAN

MATRIK PENELITIAN

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Jenis dan Sifat Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Sumber Data
Sejarah Pergerakan Nasional	Peran Nahdlatul Ulama dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1926-1945	1. Apa yang menjadi latar belakang Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam Pergerakan Nasional melawan penjajah di Indonesia Tahun 1926 – 1945? 2. Bagaimana pola	1. Penelitian Sejarah 2. Studi Literatur	Metode penelitian sejarah dengan langkah sebagai berikut: 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi politik dengan teorinya adalah teori peran	1. Buku 2. Dokumentasi 3. Observasi

perjuangan
Nahdlatul Ulama
dalam pergerakan
nasional di
Indonesia Tahun
1926 – 1945?



LAMPIRAN B

TOKOH – TOKOH NAHDATUL ULAMA



Gambar 1. KH. Hasyim Asy'ary

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



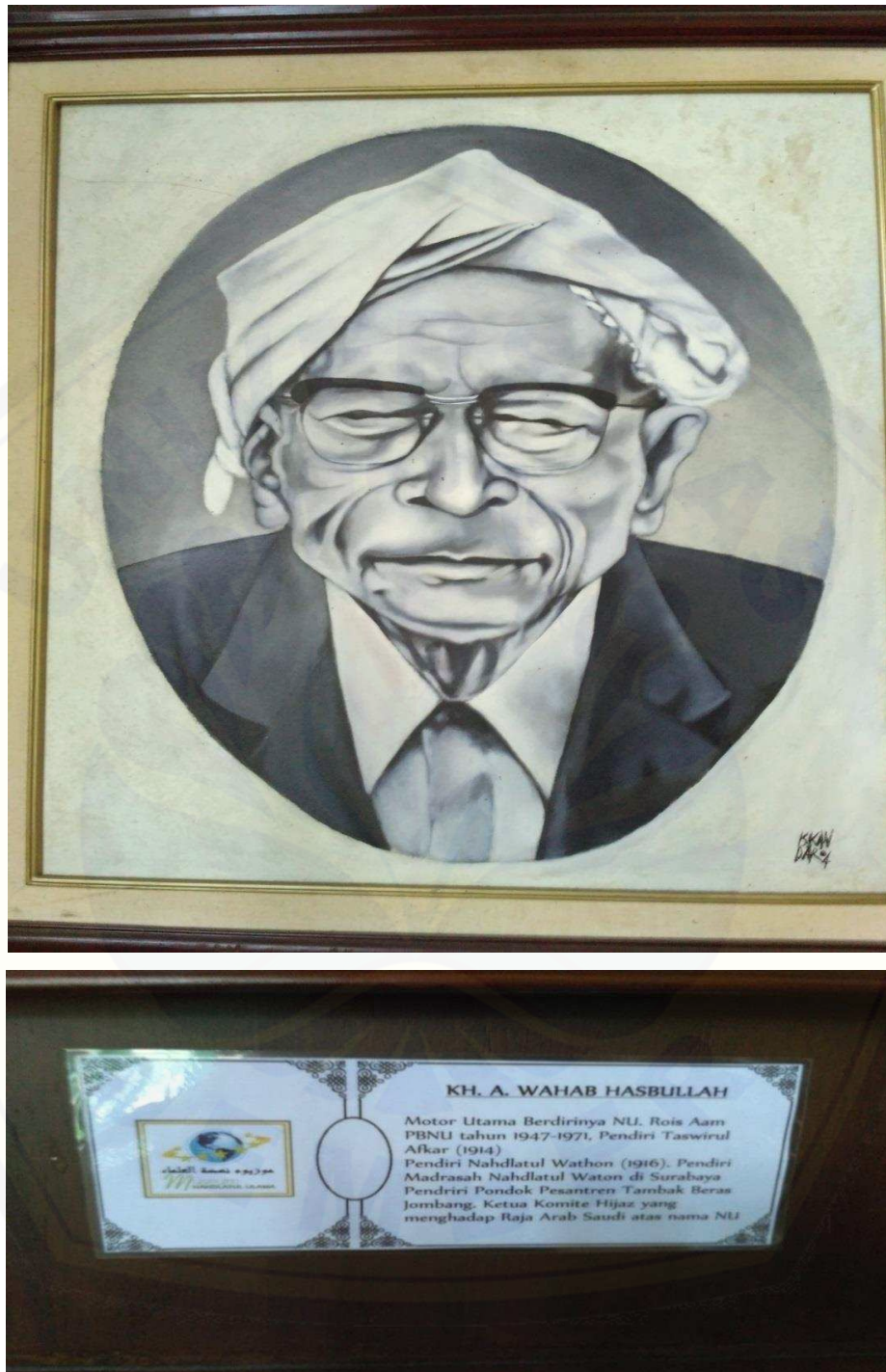
Gambar 2. KH. Wahid Hasyim

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Gambar 3. KH. Ridwan Abdullah

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Gambar 4. KH. A. Wahab Hasbullah

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Gambar 5. KH. Masykur

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



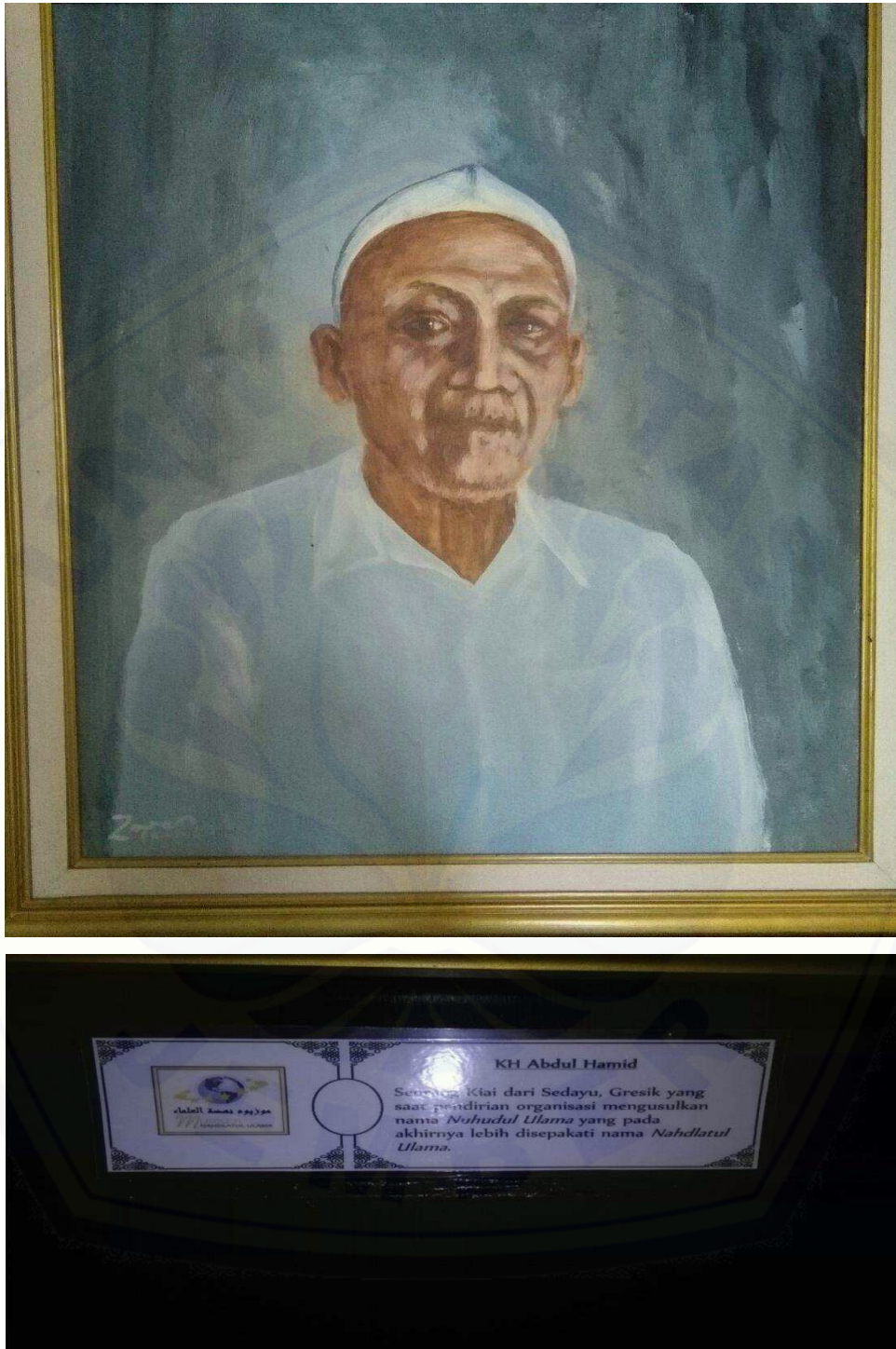
Gambar 6. KH.Mas Alwi Abdul Aziz

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdlatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Gambar 7. KH. Zainul Arifin

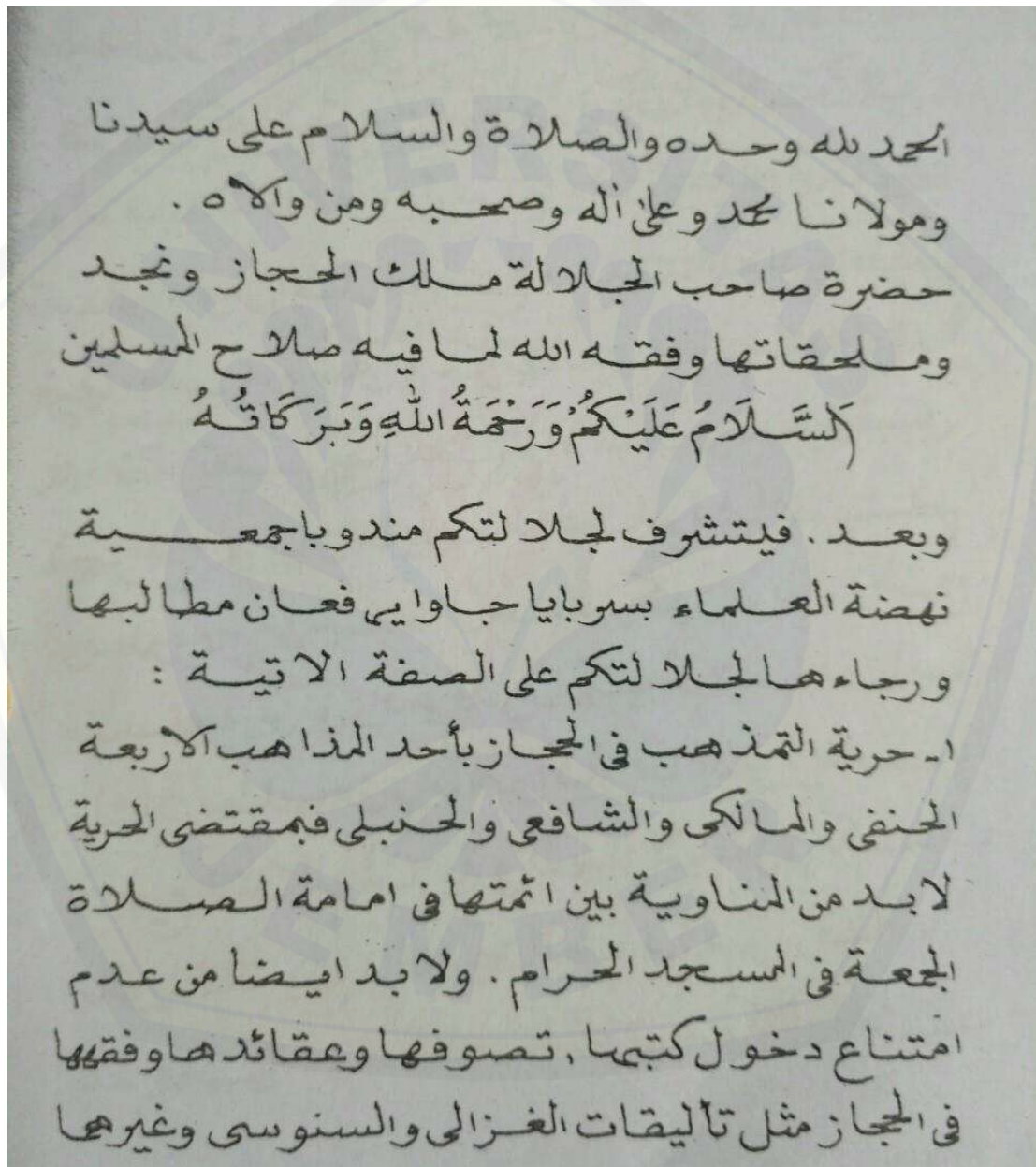
Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Gambar 8. KH. Abdul Hamid

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

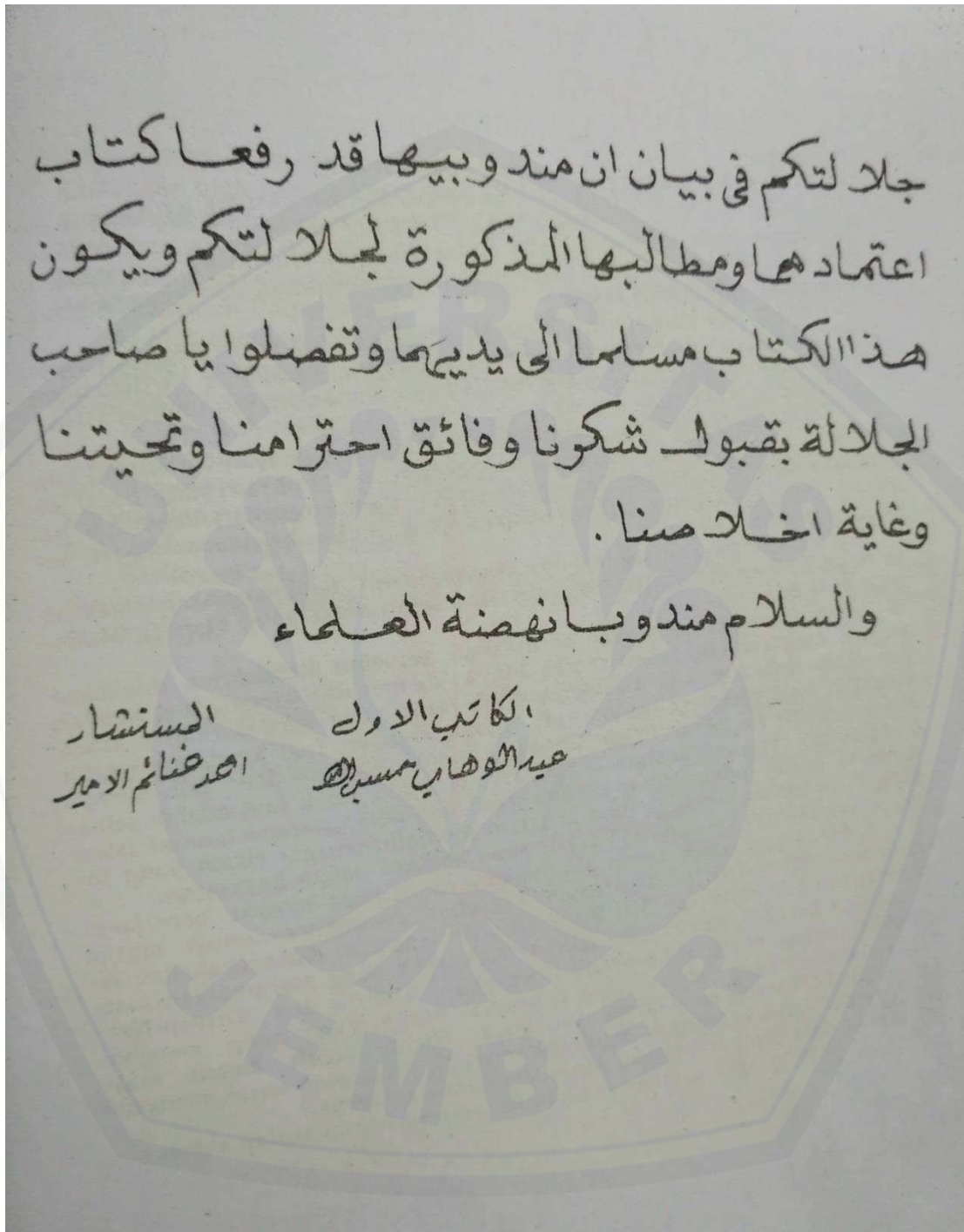
LAMPIRAN C

SURAT DELEGASI NAHDATUL ULAMA KEPADA RAJA SAUDI ARABIA
DAN TERJEMAHANNYA

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

بها هو مشهور بصحته . وما ذلك الا لاجل
 تقوية تى ابط المسلمين المتذهبين بها فيصرون
 كالبدن الواحد على ان امة محمد لن تجتمع على ضلالة .
 ٢- عن البقع الاثرية المشهورة بانها وقفت مساجد
 كولد سيدتنا فاطمة ودار خيزرات وغيرها القوله
 تعالى : ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر
 فيها اسمه وسعى في خرابها - الاية - وللاعتبار بتلك الآثار
 ٣- نشر تعريفه للعالم الاسلامي سنويا قبل
 شهر الحج في بيان ما يسلمه الحاج لمشايخهم
 ومطوفهم من جده الى جده ليكون مريدا والحج
 مستعدين في زادهم قدر ما يكفيهم ذهابا وايابا
 ولثلا يطلب منهم ما هو اكثر مما نشر رسميا .
 ٤- جميع الاحكام الجارية في الحجاز لا بد من ان تكسب
 قانونيا لثلا يقع ما هو يخالف لما فر رقيه .
 ٥- جمعية نهضة العلماء تى جو كتابا من

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

Terjemahan:

SURAT DELEGASI NU KEPADA RAJA SA'UDI ARABIA
TANGGAL 5 SYAWAL 1346

Segala puji bagi Allah yang Maha Tunggal. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad dan kepada keluarga sahabat dan pengikutnya.

Kehadapan Yang Mulya Raja Hijaz dan Nejed serta daerah kekuasaannya, semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya di dalam mengurus segala sesuatunya yang menjadikan kemaslahatan ummat Islam.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Waba'du. Kami dua orang sebagai delegasi jam'iyah Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa, merasa memperoleh kehormatan yang besar diperkenankan menghadap Yang Mulia guna menyampaikan beberapa harapan dan permohonan NU kehadapan Yang Mulia beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Memohon diberlakukannya kemerdekaan (kebebasan) bermazhab di negeri Hijaz pada salah satu dari mazhab empat ya'ni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Atas dasar kemerdekaan bermazhab tersebut hendaknya dilakukan giliran antara imam-imam sholat Jum'at di masjidil-harom. Dan hendaknya tidak dilarang pula masuknya kitab-kitab yang berdasarkan mazhab tersebut baik dibidang tashowwuf, 'aqoid, maupun fiqh ke dalam negeri Hijaz seperti karangan Imam Ghozali, Imam Sanusi dan lain-lainnya yang sudah terkenal kebenarannya. Hal tersebut tidak lain adalah semata-mata untuk memperkuat perhubungan dan persaudaraan ummat Islam yang bermazhab sehingga ummat Islam menjadi sebagai tubuh yang satu, sebab ummat Muhammad tidak akan bersatu dalam kesesatan.

2. Memohon untuk tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah yang terkenal sebab tempat-tempat tersebut diwaqafkan untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Khaezuran dan lain-lainnya berdasarkan firman Allah: "Hanyalah yang meramaikan masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah" dan firman-Nya: "Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi (orang lain) untuk menyebut Nama Allah dalam masjid-Nya dan berusaha untuk merobohkannya?", disamping untuk mengambil ibarat dari tempat-tempat yang bersejarah tersebut.

3. Memohon agar disebar luaskan ke seluruh dunia setiap tahun se-

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdlatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

belum jatuhnya musim haji mengenai tarip/ketentuan beaya yang harus diserahkan oleh jama'ah haji kepada syaech, muthowwif dari mulai Jiddah sampai pulang kembali ke Jiddah lagi. Dengan demikian orang yang akan menunaikan ibadah haji dapat menyediakan perbekalan yang cukup buat pulang-perginya dan agar supaya mereka tidak dimintai lagi lebih dari ketentuan Pemerintah.

4. Memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis sebagai undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

5. Jam'iyah Nahdlatul 'ulama memohon balasan surat dari Yang Mulia yang menjelaskan bahwa kedua orang delegasinya benar-benar sudah menyampaikan surat mandatnya dan permohonan-permohonan NU kepada Yang Mulia dan hendaknya surat balasan tersebut diserahkan kepada kedua delegasi tersebut.

Berkenankanlah kiranya Yang Mulia menerima terima kasih kami dan penghargaan, penghormatan serta tulus ikhlas kami yang setinggi-tingginya.

Wassalam,

Katib Awwal:

(A. WAHAB CHASBULLOH)

Mustasyar:

(A. GHONAIM AL-AMIR)

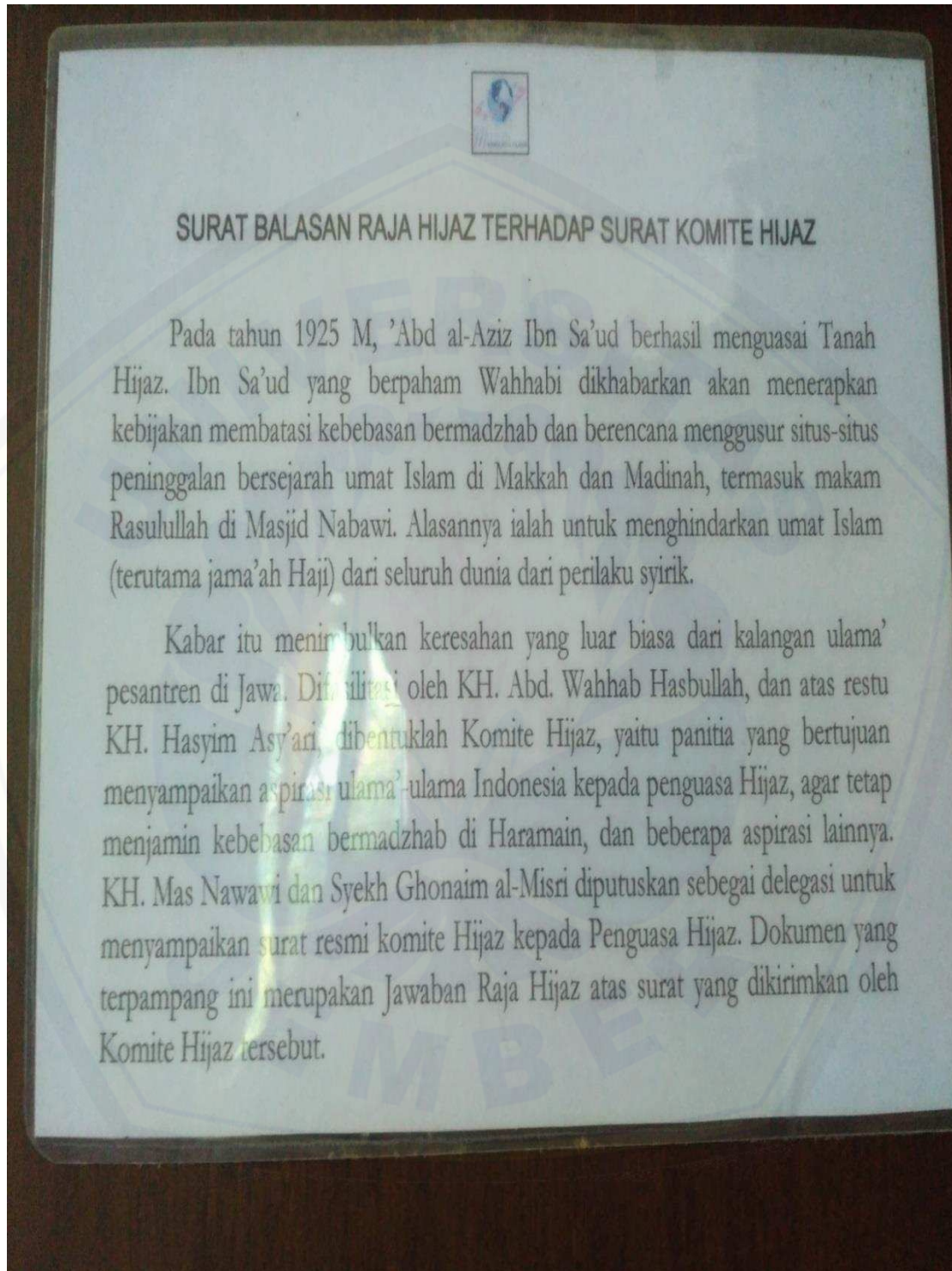
Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

LAMPIRAN D

SURAT BALASAN KERAJAAN SAUDI ARABIA UNTUK JAM'IAH NAHDATUL ULAMA DAN TERJEMAHANNYA



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

LAMPIRAN E

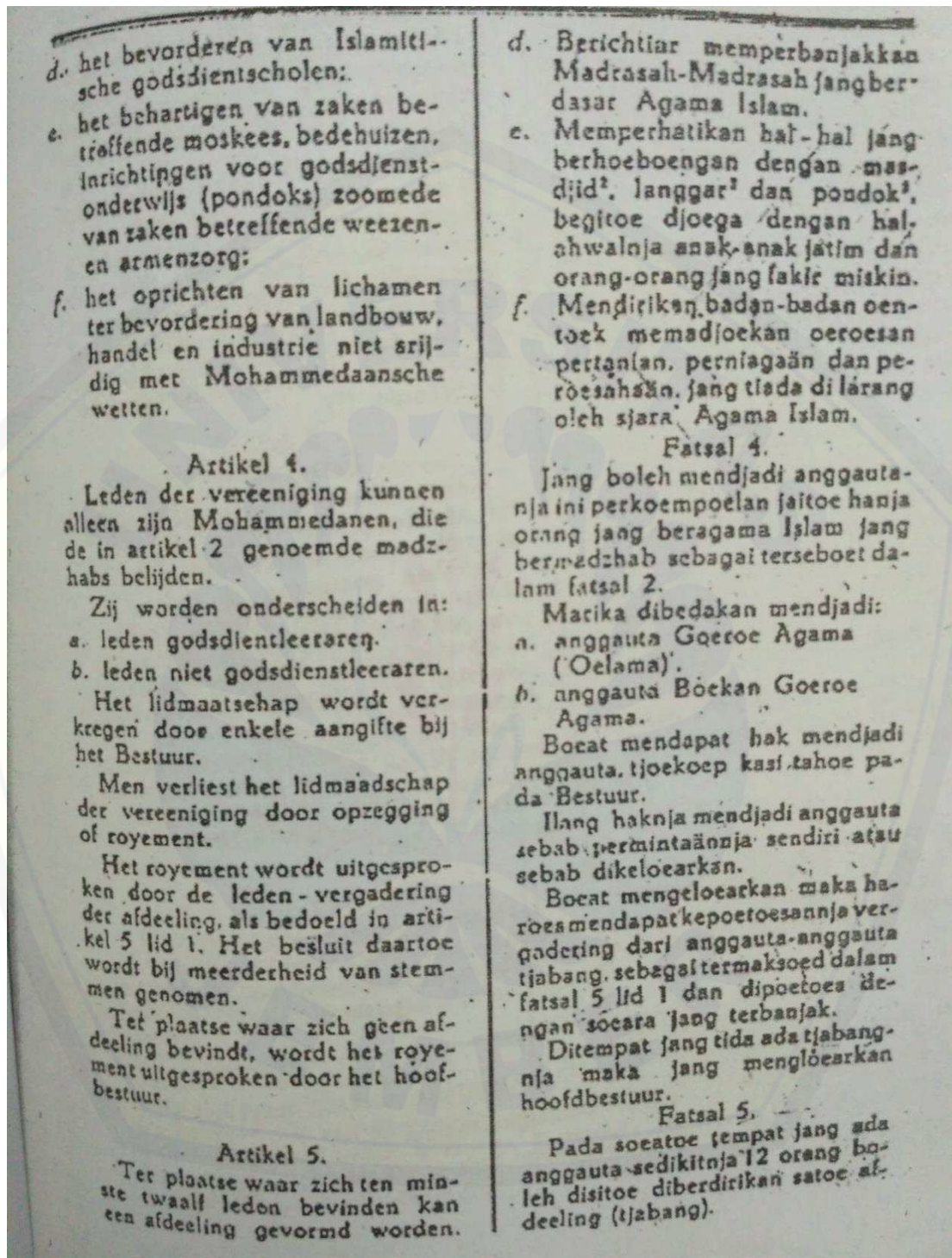
ANGGARAN DASAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1926



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

STATUTEN van de vereeniging „Nahdlatoel-'Oelama" te Soerabaja.	STATUTEN dari Perkoempoelan „Nahdlatoel-'Oelama" di Soerabaja.
<p>Artikel 1.</p> <p>De vereeniging draagt den naam van „Nahdlatoel-'Oelama" is gevestigd te Soerabaja en is op gericht voor den tijd van negen en twintig jaren, gerekend van af den dag van haar oprichting, te weten 31 Januari 1926.</p>	<p>Fatsal 1.</p> <p>Ini perkoempoelan bernama „Nahdlatoel-'Oelama" tempat kedoeokannya di Soerabaja dan diberdirikan boeat lamanja 29 tahoen, terhitoeng moelai hari berdirinja, jaitoe 31 Januari 1926.</p>
<p>Artikel 2.</p> <p>De vereeniging stelt zich ten doel de bevordering eener strenge belijdenis van een der vier Madzhabs, te weten die van Imam Moehammad bin Idris Asj-Sjafi-'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboehanifah An-Noe'man, of Imam Ahmad bin Hambal, en het verrichten van al wat naar de wetten van den Islam als goed is voorgeschreven.</p>	<p>Fatsal 2.</p> <p>Adipoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: „Memegang dengan tegoeh pada salah satoe dari madzhabnja Imam empat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris Asj-Sjafi-'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboehanifah An-Noe'man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerdjakan apa sadja jang mendjadikan kemaslahatan Agama Islam"</p>
<p>Artikel 3.</p> <p>De vereeniging tracht haar doel te bereiken door:</p> <ol style="list-style-type: none"> het scheppen van een band tusschen de 'oelama' die de in artikel 2 genoemde madzhabs belijden; het onderwerpen der kitabs (godsdienstboeken) zlvorens deze voor het godsdienstonderwijs te bezigen aan een onderzoek of zij alkomstig zijn van de Ahli Soennah Wal Djama'ah dan wel van de Ahli Bid'ah; het op den grondslag van de in artikel 2 genoemde madzhabs door alle geoorloofde middelen verspreiden van den Islam; 	<p>Fatsal 3.</p> <p>Oentoek menjapai maksoed perkoempoelan ini maka diadkan ihtiar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan perhoehoengan di antara 'Oelama'-'Oelama' jang bermadzhab terseboet dalam fatsal 2. Memeriksa kitab-kitab sebelumnja dipakai oentoek mengadjar, soepaja di ketahoei opakah itoe dari pada kitab-kitabnja Ahli Soennah Wal Djama'ah atau kitab-kitabnja Ahli Bid'ah. Menjiarkan Agama Islam di atas madzhab sebagai terseboet dalam fatsal 2, dengan dialanan apa sadja jang baik.

Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

Waar zich nog geen twaalf leden bevinden kan een correspondent aangesteld worden, die zich geregeld in verbinding heeft te stellen met het hoofdbestuur.

Elk lid dat woonachtig is op een plaats waar zich geen afdeling of correspondent bevindt is verplicht zich aan te sluiten bij de dichtstbijgelegen afdeling, dan wel voorzoover er zich geen afdeling in de nabijheid aanwezig is, zich in geregelde verbinding te stellen met de naastbij woonachtige correspondent.

Artikel 6.

De hoogste macht der vereeniging berust bij het congres van afgevaardigden.

De beslissingen ter congresse van specifiek godsdienstige belangen worden uitsluitend genomen door de afgevaardigde godsdienstleeraren.

In alle andere gevallen nemen de afgevaardigden niet godsdienstleeraren deel.

Artikel 7.

De vereeniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door het hoofdbestuur welke uit ten minste negen leden moet bestaan.

Bila beloen ada anggautanja 12 boleh diadakan satoe correspondent jang selaloe mengadakan perhoeboengandengan hoofdbestuur.

Satoe anggauta jang beroemah di soetoe tempat jang tiada afdelingnja atau correspondent, haroes memboeboehkan dirinja pada afdeling jang berdekatan, djoega bila didekatnja tiada afdeling soepaja memboeboehkan dirinja dengan correspondent jang berdekatan. (*)

Fatsal 6.

Kekoesaan jang tertinggi dari ini perkoempoelan jaitoe terpegang oleh congres dari oetoesan.

Sekalian oetoesan di dalam congres jang perloe dengan keterangan hoekoem Agama, henja boleh dipoetoes oleh oetoesan-oetoesan dari golongan Goeroe Agama ('oelama').

Lain-lain oetoesan jang tiada begitoe perloe dengan keterangan hoekoem Agama, oetoesan jang boekan goeroe Agama boleh toerort memortoesanja.

Fatsal 7.

Ini perkoempoelan diloeer dan didalam pengadilan diwakili oleh hoofdbestuur jang kedjadian dari sedikitnja 9 anggauta.

(*) Oentoek memoedahkan oeroesan organisatie, maka ditetapkan sebagai jang diterangkan dalam Hutshoudelijk Reglement, ja'ni dikitob Oerisan Moerah Bagian oeroesan Oemoem bab 1. (Budan perkoempoelan) fatsal 12.

Van de negen hoofdbestuursleden moeten ten minste vier leden behooren tot de leden godsdienstleeraren welke vier leden in het hoofdbestuur de functie bekleeden van Rais, Wakiloerrois, Katib en A'wan.

De vijf overige zetels in het hoofdbestuur worden vervuld door leden niet godsdienstleeraren, welke vijf leden de functies bekleeden van president, vice-president, kassier, secretaris en commissaris.

Artikel 8.

De geldmiddelen der vereeniging worden verkregen door alle middelen welke door den Islam niet verboden zijn.

Artikel 9.

Over een voorstel tot wijziging der statuten kan alleen beslissen het congres van afgevaardigden waar aanwezig moeten zijn zoovele afgevaardigden als vertegenwoordigende ten minste de helft van het aantal leden.

De beslissing van het voorstel geschiedt met meerderheid van stemmen.

Artikel 10.

Ontbinding der vereeniging kan alleen plaats hebben krachtens besluit de voorwaarden moeten worden vervuld als vervat in artikel 9.

Indien er na de ontbinding eenig slot overblijft, wordt dit slot ten behoeve van een vereeniging welke een soort gelijk doel als die van deze vereeniging beoogt besteed of voor een liefdadig doel

Ini 9 anggauta dari hoofdbestuur terdjadi dari sedikitnja 4 Goeroe Agama ('Oelama'), dan ini 4 anggauta didalam hoofdbestuur memangkoe djabatan Rais, Wakiloerrois, Katib dan A'wan.

Ketinggalannja 5 kedoedoean dalam hoofdbestuur diisi oleh 5 anggauta jang boekan oelama' dengan memangkoe djabatan President, Vice President, Kassier, Secretaris dan Commissaris.

Fatsal 8.

Hasilnja ini perkoempoelan terdapat dari apa sadja jang tiada dilarang oleh Agama Islam.

Fatsal 9.

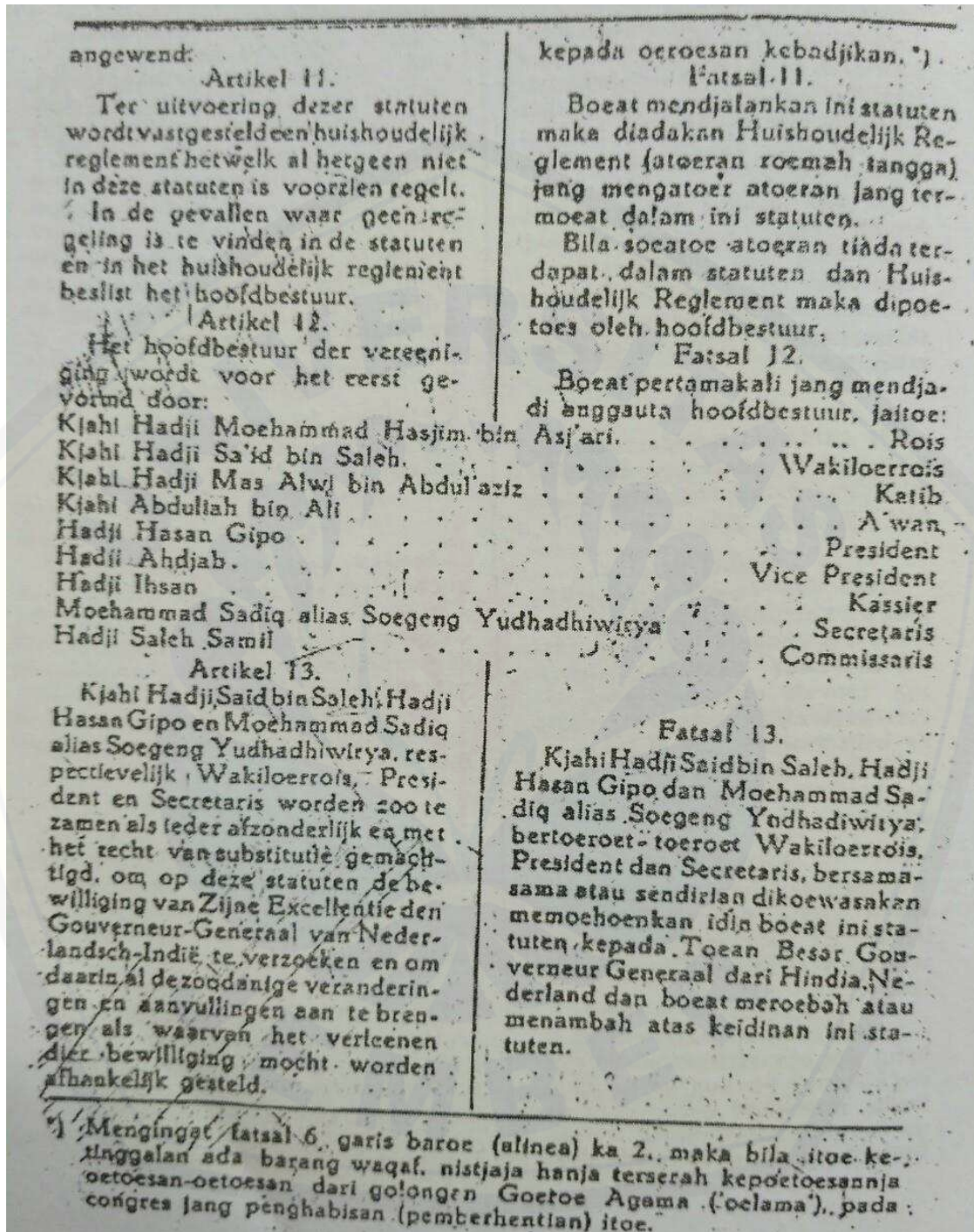
Soeatoe permintaän boeat merobah ini statuten hanja boleh dipoetoes dalam Congres dari oetoesan-oetoesan jang menghadhi sedikitnja separo dari banjaknja anggauta semoea.

Boeat memoetoes ini permintaän haroes menoeroet soeara jang terbanjak.

Fatsal 10.

Bocut memberhentikan ini perkoempoelan hanja bisa terdjadi menoeroet kepoetoesan jang memenoehi atoeran seperti terseboet dalam fatsal 9.

Djika sesoedahnja pemberhentian itoe ada mempoenjal barang ketinggalan, maka itoe barang haroes diberikan kepada perkoempoelan jang sama maksoednja dengan ini perkoempoelan, atau kalau tiada ada boleh laloe diberikan



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016

LAMPIRAN G

GAMBARAN MUSEUM NAHDATUL ULAMA SURABAYA



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



Sumber : Diperoleh dari data Museum Nahdatul Ulama Surabaya tanggal 12 November 2016



SURAT KETERANGAN

Nomor: 16/ MNU/ VII/ 2016

Yang Bertamda Tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : **Edi Eka Setiawan, S.Hum**
Status : Pengelola Museum NU Surabaya
Alamat : Jln. Gayung Sari Timur No 35 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : **Anisatul Khoir Aprilia**
NIM : 120210302070
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pencarian data terkait "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pergerakan Nasional Di Indonesia Tahun 1926-1945" di Museum NU Surabaya, Jawa Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Nopember 2016

Museum Nahdlatul Ulama

Edi Eka Setiawan, S.Hum.
Pengelola MNU



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
Telepon: (0331)- 330224, 334267, 337422, 333147 * Faximile: 0331-339029
Laman: www.fkip.unej.ac.id

Nomor **10011**/UN25.1.5/LT/2016
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

03 NOV 2016

Yth. Pengurus Museum Nahdlatul Ulama
Surabaya - Jawa Timur

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk penyusunan Skripsi, mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini:

Nama : Anisatul Khoir Aprilia
NIM : 120210302070
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Bermaksud mengadakan penelitian tentang "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Pergerakan Nasional Di Indonesia Tahun 1926-1945" di Museum Nahdlatul Ulama Surabaya, Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara/Saudari berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. Sukatman, M.Pd.

NIP.
196401231995121001